



Audit *Capability Level* dengan Menggunakan COBIT 5 Domain DSS (*Deliver, Service and Support*)

(Studi Kasus : Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Sistem Informasi Universitas Jember dan mencapai gelar Sarjana Komputer

Oleh
Nur Andita Prasetyo
NIM 152410101120

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persesembahkan untuk:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk mempermudah dan melancarkan dalam pengerjaan skripsi;
2. Bapak Ramto dan Ibu Siyati;
3. Guru-guruku dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Keluarga besar Selection yang selalu menemani dan membantu selama di perkuliahan;
5. Civitas Akademik Fakultas Ilmu Komputer atas pelayanan yang sangat baik selama di perkuliahan;
6. Almamater Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.

MOTO

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu”

-QS. Al-Baqarah 153-



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Andita Prasetyo

NIM : 152410101120

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Audit *Capability Level* dengan Menggunakan COBIT 5 Domain DSS (*Deliver, Service and Support*) (Studi Kasus : Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Mei 2019

Yang menyatakan,

Nur Andita Prasetyo

NIM 152410101120

SKRIPSI

Audit *Capability Level* dengan Menggunakan COBIT 5 Domain DSS (*Deliver, Service and Support*)

(Studi Kasus : Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember)

Oleh :

Nur Andita Prasetyo

NIM 152410101120

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Fahrobbby Adnan, S.Kom., M.MSI

Dosen Pembimbing Pendamping : Beny Prasetyo, S.Kom., M.Kom

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Audit *Capability Level* dengan Menggunakan COBIT 5 Domain DSS (*Deliver, Service and Support*) (Studi Kasus : Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember)”, telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jumat, 14 Juni 2019

tempat : Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember

Disetujui oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Fahrobbey Adnan, S.Kom., M.MSI

Beny Prasetyo, S.Kom., M.Kom

NIP 198706192014041001

NIP 760016852

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi berjudul “Audit *Capability Level* dengan Menggunakan COBIT 5 Domain DSS (*Deliver, Service and Support*) (Studi Kasus : Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember)”, telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jumat, 14 Juni 2019

tempat : Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember

Tim Penguji,

Penguji I,

Penguji II,

Prof. Dr. Saiful Bukhori, ST.,M.Kom Gama Wisnu Fajarianto, S.Kom.,M.Kom

NIP. 196811131994121001

NIP. 760015717

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Komputer,

Prof. Dr. Saiful Bukhori, ST.,M.Kom

NIP. 196811131994121001

RINGKASAN

Audit *Capability Level* dengan Menggunakan COBIT 5 Domain DSS (*Deliver, Service and Support*) (Studi Kasus : Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember), Nur Andita Prasetyo, 152410101120;2019, xxx HALAMAN; Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIRENBANG) mengakomodir Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia no. 25 tahun 2004 tentang perencanaan disusun dengan sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah mendukung koordinasi dan juga meningkatkan integrasi antar pelaku pembangunan. Salah satu programnya adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan salah satu produk yang dihasilkan adalah rencana pembangunan tahunan. Sirenbang digunakan secara berkala untuk mendukung perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten. Sehingga menjadikannya harus dalam kondisi optimal. Selain itu, diperlukan pengukuran *capability level* Sirenbang Jember dengan melakukan audit.

Capability level dapat diketahui dengan melakukan audit menggunakan COBIT 5. COBIT 5 juga dipilih dikarenakan fokus utama COBIT 5 adalah keselarasan TI dengan bisnis. Pengukuran *capability level* Sirenbang Jember dilakukan untuk menjaga Sirenbang Jember dalam kondisi optimal sehingga dapat mengakomodir Undang-Undang Republik Indonesia no. 25 tahun 2004.

Tahap awal pada penelitian ini adalah identifikasi masalah, menentukan tujuan dan batasan masalah dan tinjauan pustaka. Pada tahap pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada Sub-Bidang Program BAPPEDA untuk menentukan proses domain DSS yang akan diaudit dan menentukan narasumber. Setelah itu akan dilakukan proses audit sesuai dengan proses domain DSS dengan narasumber yang telah didapat sebelumnya. Penilaian *capability level* dilakukan sesuai hasil wawancara dan bukti yang diperoleh. Kemudian perhitungan gap dilakukan antara *capability level* yang tercapai dan *capability level* yang ingin

dicapai. Dari perhitungan *gap* dapat ditemukan rekomendasi untuk Sirenbang agar memenuhi *level* yang ingin dicapai.

Hasil audit pada Sirenbang Jember menggunakan COBIT 5 domain DSS memperoleh hasil DSS01 berada pada *level* 1 karena matrik pada *base practice* dan *work products* pada *level* 1 terpenuhi sedangkan DSS02, DSS03, DSS04, DSS05 dan DSS06 berada pada *level* 0 karena matrik pada *base practice* dan *work products* pada *level* 1 tidak terpenuhi. Rekomendasi yang dapat diberikan dibagi menjadi dua yaitu rekomendasi praktik dasar dan rekomendasi pencapaian *capability level* yang ingin dicapai. Rekomendasi praktik dasar sesuai COBIT 5 tidak memperhatikan *capability level* saat ini dan *capability level* yang ingin dicapai, sedangkan rekomendasi pencapaian *capability level* yang ingin dicapai memperhatikan gap antara *capability level* saat ini dan *capability level* yang ingin dicapai.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Audit *Capability Level* dengan Menggunakan COBIT 5 Domain DSS (*Deliver, Service and Support*) (Studi Kasus : Sirenbang Pemerintah Daerah Kabupaten Jember)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Saiful Bukhori, ST.,M.Kom selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
2. Fahrobbey Adnan, S.Kom., M.MSI selaku Dosen Pembimbing Utama dan selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang telah mendampingi penulis sebagai mahasiswa dan telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi;
3. Beny Prasetyo, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi;
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staff karyawan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
5. BAPPEDA Jember sebagai penyedia Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (Sirenbang) yang telah memberikan ijin penelitian;
6. Bapak Ramto, Ibu Siyati, saudara perempuan Fitri dan Rari, saudara laki-laki Seno dan Deni serta keponakan-keponakan yang selalu mendoakan dan menjadi pendukung utama penulis;
7. Sahabat seperjuangan Rijal dan Bani yang telah memberikan motivasi;
8. Sahabat DSS Sandi, Juven, Ainun dan Bima yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu;
9. Sahabat teristimewa Juvensius, Sandi, Ferel, Tamagochi, Alvi, Wildan, Thariq, Musa, Micin yang telah meluangkan waktu untuk menghibur;

10. Teman-teman seperjuangan SELECTION angkatan 2015;
11. Semua mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang telah menjadi keluarga bagi penulis selama menempuh pendidikan S1;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun dari semua pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 17 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTO	iii
PERNYATAAN	iv
SKRIPSI	v
PENGESAHAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN PENGUJI	vii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	5
1.5 Batasan Masalah	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Sirenbang Kab. Jember (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember)	7
2.3 COBIT 5	10
2.3.1 Domain COBIT 5	10
2.3.2 DSS	10
2.3.3 <i>Process Assessment Model</i>	13
2.4 <i>Capability Level</i>	16
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian	18
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	18
3.3 Tahapan Penelitian	18

3.3.1	Identifikasi Masalah.....	19
3.3.2	Menentukan Tujuan dan Batasan Masalah	19
3.3.3	Tinjauan Pustaka.....	19
3.3.4	Identifikasi Tujuan dan Proses Bisnis.....	19
3.3.5	Wawancara, Observasi dan Pengisian Dokumen Assessment	25
3.3.6	Analisa Hasil Audit.....	48
3.3.7	Analisa Rekomendasi Hasil Audit.....	49
3.3.8	Kesimpulan dan Saran	49
	BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1	Identifikasi Tujuan dan Proses Bisnis	50
4.2	Pengisian Dokumen <i>Assessment</i>	61
4.3	Analisa Hasil Audit	82
4.4	Analisa Rekomendasi Hasil Audit	83
4.4.1	Analisis <i>Gap</i> dan Rekomendasi Proses DDS01	83
4.4.2	Analisis <i>Gap</i> dan Rekomendasi Proses DDS02	85
4.4.3	Analisis <i>Gap</i> dan Rekomendasi Proses DDS03	87
4.4.4	Analisis <i>Gap</i> dan Rekomendasi Proses DDS04	88
4.4.5	Analisis <i>Gap</i> dan Rekomendasi Proses DDS05	90
4.4.6	Analisis <i>Gap</i> dan Rekomendasi Proses DDS06	92
	BAB 5. PENUTUP	95
5.1	Kesimpulan	95
5.2	Saran.....	96
	DAFTAR PUSTAKA	98
	LAMPIRAN	100
A.	Generic Work Products.....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Halaman awal Sirenbang	7
Gambar 2. 2 Menu Sirenbang.....	8
Gambar 2. 3 Menu PPAS	8
Gambar 2. 4 Menu PPAS Perubahan	9
Gambar 2. 5 Menu E-Rembug.....	9
Gambar 2. 6 <i>Proses Assessment Model</i>	14
Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian.....	18
Gambar 3. 2 Pemetaan <i>IT-Related Goals</i> dengan <i>Enterprise Goals</i>	22
Gambar 3. 3 Pemetaan <i>IT-Related Process</i> dan <i>IT-Related Goals</i>	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 <i>Level</i> dan <i>Process Attribute</i> dari <i>Process Capability</i>	14
Tabel 2. 2 <i>Rating Point (RP)</i>	16
Tabel 3. 1 Tabel Pemetaan <i>Enterprise Goals</i> dan BSC	20
Tabel 3. 2 Tabel Hasil Pemetaan <i>IT-Related Process</i> dengan <i>IT-Related Goals</i> ..	23
Tabel 3. 3 Lembar Kerja Audit Bagian <i>base practice</i> dan <i>Work Product</i>	26
Tabel 3. 4 <i>Generic Practice (GP)</i> dan <i>Generic Work Product (GWP) Process Attribute (PA) 2.1</i>	46
Tabel 3. 5 Hasil Penilaian <i>Capability Level DSS01</i>	48
Tabel 3. 6 Hasil Akhir Penilaian Audit.....	48
Tabel 4. 1 Pemetaan Sasaran Strategis Sirenbang Jember dengan <i>Enterprise Goals</i>	51
Tabel 4. 2 Pemetaan enterprise goals dan IT-Related Goals.....	54
Tabel 4. 3 Pemetaan IT-Related Goals dan IT-Related Process	59
Tabel 4. 4 <i>RACI Chart</i>	60
Tabel 4. 5 Hasil Pemetaan proses dan <i>Level Target</i>	61
Tabel 4. 6 Hasil <i>Assessment DSS01</i>	62
Tabel 4. 7 Dokumen <i>Assessment DSS01</i>	63
Tabel 4. 8 Hasil <i>Assessment DSS02</i>	65
Tabel 4. 9 Dokumen <i>Assessment DSS02</i>	66
Tabel 4. 10 Hasil <i>Assessment DSS03</i>	68
Tabel 4. 11 Dokumen <i>Assessment DSS03</i>	69
Tabel 4. 12 Hasil <i>Assessment DSS04</i>	71
Tabel 4. 13 Dokumen <i>Assessment DSS04</i>	72
Tabel 4. 14 Hasil <i>Assessment DSS05</i>	75
Tabel 4. 15 Dokumen <i>Assessment DSS05</i>	76
Tabel 4. 16 Hasil <i>Assessment DSS06</i>	79
Tabel 4. 17 Dokumen <i>Assessment DSS06</i>	80
Tabel 4. 18 Hasil Keseluruhan <i>Capability Level</i>	82
Tabel 4. 19 nilai GAP	83

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan langkah awal dari penulisan tugas akhir. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, batasan masalah.

1.1 Latar Belakang

Capability Teknologi Informasi (TI) atau kapabilitas TI juga dapat disebut dengan kemampuan TI. Menurut (Zhang & Sarker, 2008) kemampuan TI merupakan kemampuan perusahaan yang menggunakan TI sebagai dasar untuk memobilisasi dan menyebarkan sumber daya dalam rangka menggabungkan sumber daya dan kemampuan perusahaan yang lainnya. Kemampuan TI adalah kemampuan suatu teknologi dalam sebuah organisasi dapat berupa sistem komputer yang bertujuan untuk mengelola segala hal yang berhubungan dengan informasi (Nakata, Zhu, & Kraimer, 2008). Sedangkan (Susanto, 2016) mengatakan *Capabilities* adalah kemampuan organisasi untuk menghasilkan *Valuable Services* yang didapatkan dengan cara pengoordinasian dan pengalokasian *Resources*. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan kemampuan TI adalah kemampuan teknologi yang dimiliki suatu organisasi untuk mengelola sumber daya informasi.

Orientasi TI dan kinerja memiliki perbandingan lurus, (Jaferian & Rezvani, 2014) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja yang baik merupakan perusahaan yang memiliki orientasi pada TI. Menurut (Hsu, 2014) perusahaan atau organisasi dapat meningkatkan keunggulan kompetitif yang signifikan dengan menggunakan strategi TI. Jadi, semakin optimal kemampuan TI suatu organisasi, maka semakin tinggi kinerja bisnis. Menurut (Sawyer, 2005) audit bertujuan untuk menilai operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam suatu organisasi secara sistematis dan objektif. Oleh karena itu, audit kapabilitas TI berguna untuk menilai suatu kemampuan atau tata kelola TI pada suatu organisasi. Untuk dapat mengaudit tata kelola TI terdapat panduan dan kerangka kerja yang telah dikembangkan oleh beberapa peneliti.

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk audit *Capability TI* antara lain : *Information Technology Infrastructure Library (ITIL)*, *Control Objective for Information and related Technology (COBIT)* dan *ISO/IEC 38500*. *ITIL* dikhkususkan pada pengelolaan pelayanan TI dan organisasi dapat merancang dan menjalankan sistem tata kelola TI dengan menggunakannya sebagai pedoman (Jogiyanto, 2011). *COBIT* digunakan sebagai alat bantu dalam mengelola resiko dan keuntungan yang berhubungan dengan sumber daya informasi dengan cara menganalisa permasalahan pada tata kelola TI suatu organisasi (ISACA, COBIT 5: A Business Framework for The Governance and Management of Enterprise IT, 2012). *ISO/IEC 38500* merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk memahami definisi, model dan prinsip yang berkaitan dengan TI oleh mereka yang berada pada *level* tertinggi pada sebuah organisasi (International Organization for Standardization, 2008).

Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 27 tahun 1980 tentang pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah mengatakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tingkat II adalah badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II. BAPPEDA Tingkat II yang dimaksud adalah BAPPEDA yang ada pada Kabupaten/Kota Madya. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Salah satu fungsi Bappeda adalah Penyusunan Program Tahunan Daerah, untuk mempermudah pelaksanaannya, Bappeda Jember mempunyai sistem yang bernama Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember (Sirenbang). Sirenbang Jember adalah aplikasi yang berguna untuk musyawarah perencanaan pembangunan pada Kabupaten Jember. Aplikasi ini berbasis website online sehingga dibutuhkan koneksi internet untuk menggunakannya. Fitur yang ada dalam website ini antara lain : Sirenbang, PPAS, PPAS-Perubahan, E-Rembug.

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIRENBANG) mengakomodir Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan

Undang-Undang Republik Indonesia no. 25 tahun 2004 tentang perencanaan disusun dengan sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah mendukung koordinasi dan juga meningkatkan integrasi antar pelaku pembangunan. Salah satu programnya adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan salah satu produk yang dihasilkan adalah rencana pembangunan tahunan. Sirenbang Jember digunakan secara berkala untuk mendukung perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Jember. Sehingga menjadikannya harus dalam kondisi optimal. Selain itu, diperlukan pengukuran *capability level* Sirenbang Jember dengan melakukan audit.

Capability level dapat diketahui dengan melakukan audit menggunakan COBIT 5. COBIT 5 juga dipilih dikarenakan fokus utama COBIT 5 adalah keselarasan TI dengan bisnis. COBIT 5 membagi proses tata kelola TI menjadi 5 domain, yaitu EDM (*Evaluate, Direct and Monitor*) Untuk penilaian, optimasi risiko dan sumber daya, mencakup praktek dan kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi pilihan strategis, memberikan arahan kepada TI dan pemantauan hasilnya, APO (*Align, Plan and Organise*) mencakup strategi dan taktik TI agar dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis, BAI (*Build, Acquire and Implement*) mencakup perubahan dan pemeliharaan sistem yang ada untuk memastikan bahwa TI terus memenuhi tujuan bisnis, DSS (*Deliver, Service, and Support*) berkaitan dengan dukungan layanan yang dibutuhkan meliputi pelayanan, pengelolaan keamanan dan kelangsungan, dukungan layanan bagi pengguna, dan manajemen data dan fasilitas operasional, MEA (*Monitor, Evaluate and Assess*) tertuju pada manajemen kinerja, pemantauan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan dan tata kelola dengan keseluruhan 37 proses yang ada didalamnya (ISACA, COBIT 5: A Business Framework for The Governance and Management of Enterprise IT, 2012).

Audit yang menggunakan domain DSS telah dilakukan pada penelitian sebelumnya salah satunya adalah penelitian terdahulu yang berjudul Penerapan COBIT 5 DSS untuk audit infrastruktur TI FMS PT Grand Indonesia (Nuratmojo, Darwiyanto, & Ary, 2015) yang bertujuan untuk meneliti atau mengaudit FMS

(*Facilities Management System*) dimana tujuan audit yaitu untuk melakukan verifikasi bahwa FMS dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi dan praktik yang telah disetujui atau diterima. Hasil yang didapat berupa kondisi yang ada, *capability level* dan rekomendasi perbaikan terkait pengembangan FMS.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengaudit *capability level* Sirenbang menggunakan COBIT 5 domain DSS (*Deliver, Support, Service*). Domain DSS dipilih karena Sirenbang telah berjalan sehingga domain DSS sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. COBIT 5 digunakan untuk mengaudit dan mengidentifikasi hasil *capability level* Sirenbang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara kepada pemegang otoritas Sirenbang. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang muncul sebagai berikut.

1. Bagaimana *capability level* Sirenbang Jember berdasarkan hasil audit menggunakan COBIT 5 domain DSS?
2. Apa saja rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan Sirenbang. Jember berdasarkan hasil audit menggunakan COBIT 5 domain DSS?

1.3 Tujuan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengaudit *capability level* Sirenbang untuk menunjang kinerja pembangunan. Tujuan yang menunjang tujuan utama adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui *capability level* Sirenbang berdasarkan hasil audit menggunakan DSS COBIT 5.
2. Memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan berdasarkan DSS COBIT 5.

1.4 Manfaat

Manfaat utama yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah untuk mengaudit *capability level* aplikasi. Manfaat lain yang didapat adalah sebagai berikut.

1. Bagi Akademis

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan hasil yang mampu memberikan manfaat berupa informasi terkait judul penelitian kepada pembaca khususnya Sistem Informasi Universitas Jember

2. Bagi Peneliti

Mengetahui bagaimana penerapan COBIT 5 domain DSS untuk mengaudit *capability level* Sirenbang Jember

3. Bagi Objek Penelitian

Mengetahui rekomendasi perbaikan dan pengembangan Sirenbang Jember di masa yang akan datang

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah untuk objek dan tema yang dibahas sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam proses penulisan dan menganalisis.

1. Pengambilan data dengan wawancara dan observasi
2. Responden dalam pengumpulan data adalah pemegang otoritas Sirenbang Jember yaitu Bappeda Kab. Jember.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini dipaparkan tinjauan pustaka terkait teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Teori tersebut diambil dari berbagai literatur, jurnal dan internet.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai pertimbangan dan pembelajaran mengenai audit aplikasi terkait. Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Adi Nuratmojo, Eko Darwiyanto, Gede Agung Ary yang berjudul Penerapan COBIT 5 DSS untuk audit infrastruktur TI FMS PT Grand Indonesia yang bertujuan untuk meneliti atau mengaudit FMS dengan pedoman sesuai dengan penelitian terdahulu dengan tujuan audit yaitu untuk melakukan verifikasi bahwa FMS dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi dan praktik yang telah disetujui atau diterima. Peneliti menggunakan semua proses yang ada pada domain DSS yaitu mengelola operasi, mengelola permintaan layanan dan insiden, mengelola masalah, mengelola keberlanjutan, mengelola keamanan layanan dan mengelola kontrol proses bisnis. Pada awalnya peneliti melakukan seleksi proses domain DSS untuk memilih proses DSS mana saja yang akan digunakan dengan cara pemetaan *Enterprise Goals* dengan *IT-related Goals* yang kemudian dilakukan pemetaan dengan proses DSS. Pada penelitian ini dihasilkan bahwa proses DSS01, DSS02, DSS03, DSS04, DSS05, DSS06 berada pada *level 3* yaitu *Established Process* dan *level target* adalah 4 yaitu *Predictable Process* (Nuratmojo, Darwiyanto, & Ary, 2015).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ulfatisa Cahyani , Ismiarta Aknuranda , Andi Reza Perdanakusuma dengan judul Evaluasi Layanan BPJSTK Mobile Dengan Menggunakan Domain Deliver, Service and Support Berdasarkan Framework COBIT 5 (Studi Kasus : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mataram). Penelitian ini bertujuan untuk membuat BPJSTK Mobile agar dalam keadaan optimal. Peneliti menggunakan semua proses yang ada pada domain DSS yaitu

mengelola operasi, mengelola permintaan layanan dan insiden, mengelola masalah, mengelola keberlanjutan, mengelola keamanan layanan dan mengelola kontrol proses bisnis. Peneliti menggunakan RACI Chart untuk menentukan responden. Masing-masing responden mempunyai peranan tersendiri untuk setiap proses DSS. Hasil dari penelitian ini adalah proses DSS01 dan DSS02 berada pada *level 2* yaitu *managed process*. Sedangkan pada proses DSS03, DSS04, DSS05, DSS06 berada pada *level 1* yaitu *performed process* (Cahyani, Aknuranda, & Perdanakusuma, 2018).

2.2 Sirenbang Kab. Jember (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.



Gambar 2. 1 Halaman awal Sirenbang (Sumber: sirenbang jember, 2018)

Gambar 2.1 merupakan halaman awal Sirenbang. Sirenbang atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dalam hal ini khususnya pemerintah daerah Kab. Jember adalah aplikasi yang berguna untuk musyawarah perencanaan bangunan pada Kab. Jember. Aplikasi ini berbasis website online sehingga dibutuhkan koneksi internet untuk menggunakannya.

Fitur utama yang ada dalam aplikasi ini antara lain:

1. Sirenbang



Gambar 2. 2 Menu Sirenbang (Sumber: sirenbang jember, 2018)

Gambar 2.2 adalah halaman menu Sirenbang. Sirenbang Pemerintah Daerah Kabupaten Jember bertujuan untuk musyawarah perihal bagaimana perencanaan pembangunan Kab. Jember akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Menu ini mencakup perencanaan mulai dari desa hingga kabupaten dalam hal ini Kabupaten Jember. Dalam menu ini terdapat rencana kerja selama satu tahun dan juga anggaran yang diperlukan. Dalam fitur ini terdapat data yang belum diverifikasi dan sudah diverifikasi. Dan juga laporan oleh lembaga terkait.

2. PPAS



Gambar 2. 3 Menu PPAS (Sumber: sirenbang jember, 2018)

Gambar 2.3 adalah menu Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk

disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Berisi tentang rencana yang telah diverifikasi beserta anggaran yang disediakan.

3. PPAS Perubahan



Gambar 2. 4 Menu PPAS Perubahan (Sumber: sirenbang jember, 2018)

Gambar 2.4 merupakan manu PPAS Perubahan. PPAS perubahan berisi tentang perubahan perihal PPAS yang telah disahkan sebelumnya. Dapat berupa kenaikan atau penurunan anggaran yang tersedia dan juga perbedaan kegiatan sesuai dengan perubahan yang ada.

4. E-Rembug



Gambar 2. 5 Menu E-Rembug (Sumber: sirenbang jember, 2018)

Gambar 2.5 merupakan menu E-Rembug. E-rembug adalah fitur untuk pengaduan saran dan pengaduan masyarakat kepada OPD terkait sesuai dengan keluhan. Masyarakat diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu menggunakan email untuk mengakses fitur ini dan mengajukan saran maupun pengaduan.

2.3 COBIT 5

COBIT 5 merupakan generasi terbaru dari panduan ISACA dibuat berdasarkan pengalaman penggunaan COBIT selama lebih dari 15 tahun oleh banyak perusahaan dan penggunaan dari bidang bisnis, komunitas, IT, risiko, asuransi, dan keamanan (ISACA, COBIT 5: A Business Framework for The Governance and Management of Enterprise IT, 2012).

2.3.1 Domain COBIT 5

COBIT 5 merupakan kerangka kerja atau *framework* yang dapat membantu organisasi pada aspek *governance* dan *management* terbagi dalam 5 domain, masing-masing memiliki fokus area tersendiri. 5 domain yang ada pada COBIT 5 sebagai berikut (ISACA, COBIT 5: A Business Framework for The Governance and Management of Enterprise IT, 2012):

1. EDM (Evaluate, Direct and Monitor)
2. APO (Align, Plan and Organise)
3. BAI (Build, Acquire and Implement)
4. DSS (Deliver, Service, and Support)
5. MEA (Monitor, Evaluate and Assess)

2.3.2 DSS

DSS (Deliver, Service, and Support) merupakan domain yang berhubungan dengan dukungan layanan yang dibutuhkan meliputi pelayanan, pengelolaan keamanan dan kelangsungan, dukungan layanan bagi pengguna, dan manajemen data dan fasilitas operasional. 6 proses DSS sebagai berikut (ISACA, COBIT 5: A Business Framework for The Governance and Management of Enterprise IT, 2012):

1. DSS01 – Mengelola Operasi

Pada proses ini aktivitas operasional telah dikoordinasi dan dilaksanakan serta standar prosedur operasional dan kegiatan pemantauan telah ditentukan.

2. DSS02 – Mengelola Permintaan Layanan dan Insiden

Dapat mengelola permintaan layanan dan memberikan respon terhadap segala sesuatu termasuk ketidaksengajaan dengan tepat waktu dan efektif.

3. DSS03 – Mengelola Masalah

Proses ini mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah, identifikasi masalah maupun solusinya.

4. DSS04 – Mengelola Keberlanjutan

Menetapkan dan mempertahankan rencana untuk menghadapi insiden dan gangguan dalam rangka menjaga keberlangsungan bisnis dan TI.

5. DSS05 – Mengelola Keamanan Layanan

Melindungi keamanan informasi perusahaan untuk menjaga tingkat resiko kemanan informasi sesuai kebijakan keamanan.

6. DSS06 – Mengelola Kontrol Proses Bisnis

Menentukan dan mempertahankan kendali proses bisnis yang tepat dengan tujuan untuk memastikan bahwa informasi terkait merupakan informasi yang relevan.

DSS juga terdiri dari 38 sub-proses sebagai berikut (ISACA, COBIT 5: A Business Framework for The Governance and Management of Enterprise IT, 2012):

a. DSS01 – Mengelola Operasi

- 1) DSS01.01 Menjalankan Prosedur Operasional
- 2) DSS01.02 Mengelola Layanan *Outsourced* TI
- 3) DSS01.03 Memonitor Infrastruktur TI
- 4) DSS01.04 Mengelola Lingkungan
- 5) DSS01.05 Mengelola Fasilitas

b. DSS02 – Mengelola Permintaan Layanan

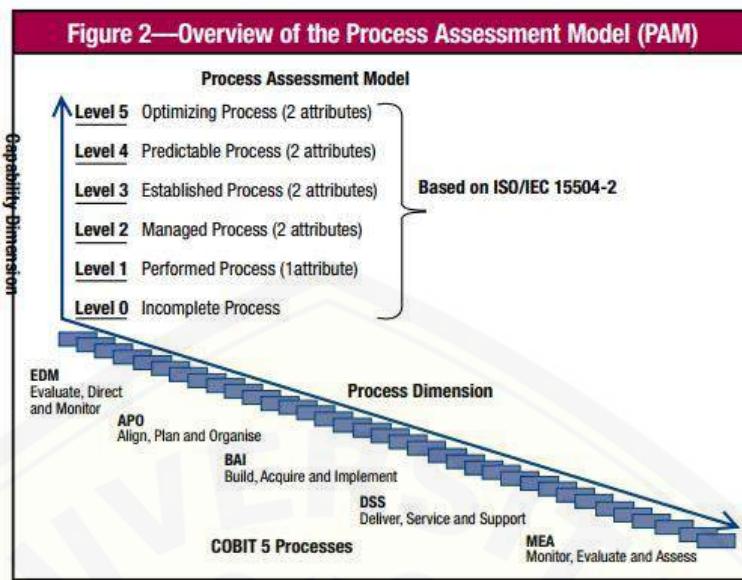
- 1) DSS02.01 Mendefinisikan Skema Klasifikasi Insiden dan Permintaan Layanan
- 2) DSS02.02 Mengklasifikasikan dan Memprioritaskan Permintaan serta Insiden
- 3) DSS02.03 Memverifikasi, Menyetujui, dan Memenuhi Permintaan
- 4) DSS02.04 Mendiagnosa dan Mengelola Insiden

- 5) DSS02.05 Menyelesaikan dan Memulihkan Insiden
- 6) DSS02.06 Menutup Permintaan Layanan dan Insiden
- 7) DSS02.07 Melacak Status dan Membuat Laporan
- c. DSS03 – Mengelola Masalah
 - 1) DSS03.01 Mengidentifikasi dan Mengklasifikasikan Masalah
 - 2) DSS03.02 Menginvestigasi dan Mendiagnosis Masalah
 - 3) DSS03.03 Mencatat *Known Error* (permasalahan yang diketahui)
 - 4) DSS03.04 Menyelesaikan dan Menutup Masalah
 - 5) DSS03.05 Menjalankan Masalah Secara Proaktif
- d. DSS04 – Mengelola Keberlanjutan
 - 1) DSS04.01 Menentukan Kelangsungan Bisnis, Kebijakan, Tujuan dan Ruang Lingkup
 - 2) DSS04.02 Menjaga Strategi Keberlanjutan Bisnis
 - 3) DSS04.03 Mengembangkan dan Mengimplementasikan Respon dan Keberlanjutan Bisnis
 - 4) DSS04.04 Latihan, Tes, dan Mengulas Dokumen *Business Continuity Plan* (BCP)
 - 5) DSS04.05 Mengulas, Menjaga dan Mengembangkan *Continuity Plan*
 - 6) DSS04.06 Mengadakan Pelatihan untuk *Continuity Plan*
 - 7) DSS04.07 Mengatur *Backup*
 - 8) DSS04.08 Melakukan Ulasan Ulang
- e. DSS05 – Mengelola Keamanan Layanan
 - 1) DSS05.01 Perlindungan dari Malware
 - 2) DSS05.02 Mengelola Jaringan dan Keamanan Konektivitas
 - 3) DSS05.03 Mengelola Keamanan Endpoint
 - 4) DSS05.04 Mengelola Identitas Pengguna dan
 - 5) DSS05.05 Mengelola Akses Fisik ke Aset TI
 - 6) DSS05.06 Mengelola Dokumen yang Sensitif dan Perangkat Luaran (*output*)

- 7) DSS05.07 Memantau Infrastruktur yang Berhubungan dengan *Security Events*
- f. DSS06 – Mengelola Kontrol Proses Bisnis
- 1) DSS06.01 Menyelaraskan Aktivitas-Aktivitas Kontrol yang ada di Proses Bisnis dengan Sasaran Organisasi
 - 2) DSS06.02 Mengontrol Pemrosesan Informasi
 - 3) DSS06.03 Mengatur Peran, Tanggung Jawab, Hak Akses, dan *Level*
 - 4) DSS06.04 Mengelola Kesalahan dan *Exceptions*
 - 5) DSS06.05 Memastikan bahwa Informasi dari *Event* dapat Ditelusuri dan Pertanggung jawabannya
 - 6) DSS06.06 Mengamankan Aset-Aset Informasi

2.3.3 Process Assessment Model

Process assessment model atau PAM merupakan model untuk melakukan penilaian *capability* proses TI pada perusahaan (ISACA, COBIT 5: *Process Assessment Model*, 2013). International Organization for Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 15504 merupakan dasar PAM disusun. PAM terdiri dari dua dimensi yaitu dimensi proses dan dimensi kapabilitas. Secara keseluruhan PAM dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 6 Proses Assessment Model (Sumber: ISACA, COBIT 5: Process Assessment Model, 2013)

Dimensi proses merupakan proses yang didefinisikan dan diklasifikasikan ke dalam kategori proses tertentu. Dimensi kapabilitas merupakan seperangkat atribut proses yang dikelompokkan ke dalam tingkatan *capability level*. Atribut proses memiliki karakteristik yang dapat diukur, sehingga dapat digunakan untuk melakukan penilaian kapabilitas setiap proses. Tabel 2.1 berikut merupakan penjelasan terkait *level* dan atribut proses:

Tabel 2. 1 Level dan Process Attribute dari Process Capability (Sumber : ISACA, Process Assessment Model, 2013)

Level	PA	Deskripsi
Level 0	0	Tidak dilakukan atau gagal
Level 1	1.1	Dilakukan tapi belum ada manajemennya
Level 2	2.1	Dilakukan dan ada perencanaan serta dimonitor
	2.2	Dilakukan, ada perencanaan dan dimonitor kemudian hasil kerja dikelola dengan baik (ditentukan kebutuhannya dan didokumentasikan)
Level 3	3.1	Dilakukan aktivitas tertulis di SOP/kebijakan/aturan atau dibuat standar pengoperasiannya, merupakan unsur penting yang wajib dilakukan
	3.2	Dilakukan aktivitas tertulis di SOP/kebijakan/aturan

<i>Level</i>	PA	Deskripsi
		atau mempunyai standar penerapan, serta ada alokasi tanggung jawab dan sumber daya yang tepat
<i>Level 4</i>	4.1	Dilakukan aktivitas tertulis di SOP/kebijakan/aturan berjalan dengan baik dan ada penerapan ukuran layanan/informasi optimal yang dihasilkan
	4.2	Dilakukan aktivitas tertulis di SOP/kebijakan/aturan atau menghasilkan layanan/informasi optimal kemudian dimonitor dan dianalisis
<i>Level 5</i>	5.1	Dilakukan, ada inovasi dan strategi pengembangan aktivitas sesuai hasil analisis dari aktivitas yang telah terstandarisasi sebelumnya
	5.2	Dilakukan, ada inovasi dan strategi pengembangan aktivitas, diukur pengaruhnya terhadap sasaran bisnis dan dievaluasi

Berdasarkan tabel 2.1 maka penjelasan untuk setiap *level* menurut ISO/IEC 15504 adalah sebagai berikut:

1. *Level 0 (incomplete)*, pada *level* ini dinyatakan tidak melaksanakan atau gagal mencapai tujuan dari proses. Pada *level 0* ditemukan sedikit bukti (*evidence*) atau tidak ada sama sekali dari setiap pencapaian tujuan proses.
2. *Level 1 (performed)*, pada *level* ini proses yang diimplementasikan telah mencapai tujuan prosesnya.
3. *Level 2 (managed)*, pada *level* ini proses yang sebelumnya telah mencapai *level 1* sekarang diimplementasikan dalam manajemen terstruktur (direncanakan, diawasi dan disesuaikan) dan produk kerja yang dikontrol.
4. *Level 3 (Established)*, pada *level* ini proses yang sebelumnya mencapai *level 2* telah didokumentasi dan ditransformasikan untuk mencapai efisiensi dari organisasi.

5. *Level 4 (Predictable)*, pada *level* ini proses diukur, diawasi dan diprediksi untuk mencapai hasil yang diinginkan.
6. *Level 5 (Optimized)*, pada *level* akhir hasil prediksi diterapkan kemudian dilakukan perbaikan untuk memenuhi tujuan bisnis yang relevan dan tujuan di masa mendatang.

Setiap *level* atribut memiliki 4 *rating point* yang didefinisikan dalam standar ISO/IEC 15504, yaitu:

Tabel 2. 2 *Rating Point* (RP) (Sumber : ISACA, *Process Assessment Model*, 2013)

Figure 6—Rating Levels		
Abbreviation	Description	% Achieved
N	Not achieved	0 to 15% achievement
P	Partially achieved	>15% to 50% achievement
L	Largely achieved	>50% to 85% achievement
F	Fully achieved	>85% to 100% achievement

Berikut penjelasan dari masing-masing *rating point*:

1. N : Tidak tercapai. Bukti pencapaian proses yang ditemukan sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali
2. P : Ditemukannya sedikit bukti pencapaian proses dan beberapa aspek pencapaian lain yang tidak dapat diprediksi
3. L : Sebagian besar bukti capaian ditemukan namun untuk beberapa aspek di dalamnya masih ada kekurangan
4. F : Sepenuhnya tercapai. Bukti yang capaian proses lengkap dan tidak ada kekurangan signifikan di dalam proses yang dinilai.

2.4 *Capability Level*

COBIT 5 dan COBIT 4.1 berbeda pada penyebutan proses penilaian dan struktur framework (Pasquini, 2013). COBIT 5 menggunakan proses penilaian yang dinamakan *Capability Level* sedangkan COBIT 4.1 menggunakan *Maturity Level*. Keduanya memiliki jumlah *level* yang sama yaitu enam *level*. Berikut penjelasan *level* dari *Process Capability* COBIT 5 (ISACA, 2012):

- a. *Level 0 Incomplete Process*

Proses tidak dilaksanakan atau gagal untuk mencapai tujuan prosesnya. Pada *level* ini, ada sedikit atau tidak ada sama sekali bukti dari setiap pencapaian tujuan proses. Tidak ada atribut proses pada tingkat ini.

b. *Level 1 Performed Process*

Proses diimplementasikan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Mempunyai satu atribut yaitu *process performance*.

c. *Level 2 Managed Process*

Proses yang diimplementasikan dikelola (direncanakan, dimonitor dan disesuaikan) dan hasilnya ditetapkan dan dikontrol. Mempunyai dua atribut yaitu *performance management* dan *work product management*.

d. *Level 3 Established Process*

Proses didokumentasikan dan dikomunikasikan (untuk efisiensi organisasi). Mempunyai dua atribut yaitu *process definition* dan *process deployment*.

e. *Level 4 Predictable Process*

Proses dimonitor, diukur, dan diprediksi untuk mencapai hasil. Mempunyai dua atribut *process measurement* dan *process control*.

f. *Level 5 Optimizing Process*

Proses diprediksikan kemudian ditingkatkan untuk memenuhi tujuan bisnis yang relevan dan tujuan yang akan datang. Mempunyai dua atribut yaitu *process innovation* dan *process optimization*.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan penjelasan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian serta tahapan penelitian yang akan digunakan.

3.1 Jenis Penelitian

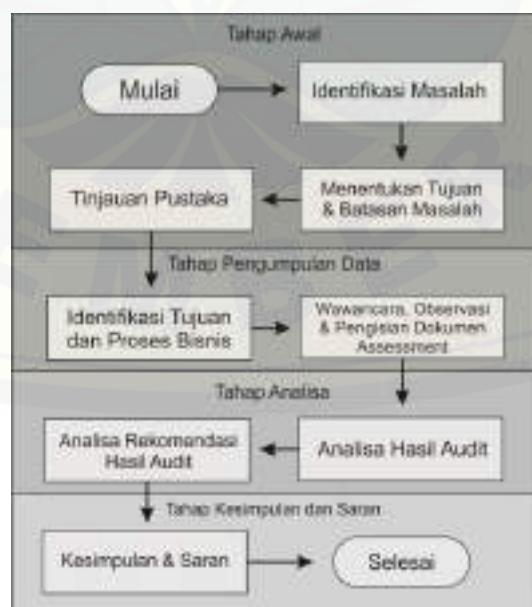
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan survey yaitu suatu penelitian lapangan dan wawancara responden yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan daftar pertanyaan sebagai alat pengumpulan data pokok untuk mencari *capability level* pada domain DSS.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan yaitu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Jember dengan rentang waktu bulan Januari 2018 hingga Juni 2019.

3.3 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian

Berikut adalah penjelasan dari tahapan penelitian pada gambar 3.1:

3.3.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan kegiatan untuk mencari dan memahami kebutuhan dari suatu studi kasus yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penelitian dan digunakan untuk menentukan permasalahan yang dapat diselesaikan setelah penelitian berlangsung. Pemerintah Daerah Kab. Jember telah menggunakan Sirenbang cukup lama namun belum ada evaluasi menyeluruh untuk menjaga tingkat optimalnya. Pada tahap ini peneliti juga menentukan batasan dan tujuan masalah, dilakukan agar penelitian tidak menyimpang atau mempunyai jalur yang jelas.

3.3.2 Menentukan Tujuan dan Batasan Masalah

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai peneliti dalam suatu penelitian. Sedangkan batasan masalah merupakan ruang lingkup dari suatu penelitian. Dengan adanya ruang lingkup, penelitian dapat lebih terfokus. Tujuan didapat setelah masalah diidentifikasi dengan maksud untuk menyelesaikan masalah yang ada. Batasan masalah ditentukan setelah tujuan dirumuskan.

3.3.3 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan dengan mempelajari tentang penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain seputar penerapan COBIT 5 dan bagaimana penelitian dilakukan. Studi literatur dapat dijadikan materi untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Materi yang valid untuk digunakan bahan studi literatur antara lain buku, jurnal, paper dari para akademisi. Studi literatur ini digunakan untuk mendukung pemilihan domain untuk mengukur *capability level* Sirenbang Kab. Jember.

3.3.4 Identifikasi Tujuan dan Proses Bisnis

Identifikasi tujuan dan proses bisnis organisasi dapat diperoleh melalui pemetaan. Pemetaan yang akan dilakukan terdiri dari *enterprise goals, IT-related goals, process control* dan *RACI chart*.

1) Pemetaan *Enterprise Goals* dengan Sasaran Strategis Sirenbang Jember

Proses pemetaan *Enterprise Goals* dengan Sasaran Strategis Sirenbang Jember bertujuan untuk mendapatkan tujuan apa saja yang dapat dilakukan untuk proses audit tata kelola TI. Proses ini menggunakan *Balance Score Card* (BSC) dengan 4 perspektif dapat diliat pada tabel 3.1. hasil pemetaan *Enterprise Goals* dengan Sasaran Strategis Sirenbang Jember akan dibahas pada Bab 4.

Tabel 3. 1 Tabel Pemetaan *Enterprise Goals* dan BSC (Sumber : ISACA, Enabling Process, 2012)

BSC Dimension	EG	Enterprise Goals	Sasaran Strategis Sirenbang			
			Sasaran Strategis 1	Sasaran Strategis 2	Sasaran Strategis 3	Sasaran Strategis 4
Financial	1	<i>Stakeholder value of business investments</i>				
	2	<i>Portfolio of competitive products and services</i>				
	3	<i>Managed business risk (safeguarding of assets)</i>				
	4	<i>Compliance with external laws and regulations</i>				
	5	<i>Financial transparency</i>				
Customer	6	<i>Customer-oriented service culture</i>				
	7	<i>Business service continuity and availability</i>				
	8	<i>Agile responses to changing business environment</i>				
	9	<i>Information-based strategic decision making</i>				
	10	<i>Optimisation of service delivery costs</i>				
Internal	11	<i>Optimisation of business process functionality</i>				
	12	<i>Optimisation of business process cost</i>				
	13	<i>Managed business change programmes</i>				
	14	<i>Operational and staff productivity</i>				
	15	<i>Compliance with internal</i>				

		<i>policies</i>				
<i>Learning and Growth</i>	16	<i>Skilled and motivated people</i>				
	17	<i>Product and business innovation culture</i>				

Pemetaan pada tabel 3.1 diisi dengan huruf “P” yang berarti *primary relationship* jika sasaran strategis dan *enterprise goals* memiliki hubungan yang kuat. Jika sasaran strategis dan *enterprise goals* memiliki hubungan namun tidak kuat atau tidak dominan maka diisi dengan huruf “S” yang berarti *secondary relationship*. Namun jika tidak memiliki hubungan maka dikosongkan.

Enterprise goals yang sama sekali tidak terdapat huruf “P” maka dieliminasi. Dan *enterprise goals* yang terdapat huruf “P” dipetakan dengan *IT-Related Goals*.

2) Pemetaan *IT-Related Goals* dengan *Enterprise Goals*

Proses pemetaan *IT-Related Goals* dengan *Enterprise Goals* dilakukan guna menjelaskan tujuan TI dengan tujuan-tujuan organisasi. Proses ini menggunakan *IT-Balance Score Card* (IT-BSC). *IT-Related Goals* yang sama sekali tidak terdapat huruf “P” maka dieliminasi. Dan *IT-Related Goals* yang terdapat huruf “P” dipetakan dengan Domain DSS.

Pemetaan *IT-Related Goals* dengan *Enterprise Goals* menggunakan empat perspektif, untuk lebih jelasnya terdapat pada gambar 3.2 berikut:

		Enterprise Goal																	
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		IT-related Goal						Financial			Customer			Internal			Learning and Growth		
Financial	01	Alignment of IT and business strategy	P	P	S			P	S	P	P	S	P	S	P		S	S	
	02	IT compliance and support for business compliance with external laws and regulations			S	P										P			
	03	Commitment of executive management for making IT-related decisions	P	S	S					S	S	S	P		P		S	S	
	04	Managed IT-related business risk			P	S		P	S	P				S		S	S	S	
	05	Realised benefits from IT-enabled investments and services portfolio	P	P				S	S	S	S	P	S	S			S		
	06	Transparency of IT costs, benefits and risk	S		S	P			S	P	P								
Customer	07	Delivery of IT services in line with business requirements	P	P	S	S		P	S	P	S	P	S	S		S	S		
	08	Adequate use of applications, information and technology solutions	S	S	S			S	S	S	S	P	S	P		S	S		
	09	IT agility	S	P	S			S		P		P		S	S	S	P		
	10	Security of information, processing infrastructure and applications			P	P			P						P				
	11	Optimisation of IT assets, resources and capabilities	P	S						S		P	S	P	S	S	S		
	12	Enablement and support of business processes by integrating applications and technology into business processes	S	P	S			S	S	S	P	S	S	S	S		S		
Internal	13	Delivery of programmes delivering benefits, on time, on budget, and meeting requirements and quality standards	P	S	S			S			S	S	P						
	14	Availability of reliable and useful information for decision making	S	S	S	S			P	P	S								
	15	IT compliance with internal policies			S	S									P				
	16	Competent and motivated business and IT personnel	S	S	P			S	S					P		P	S		
	17	Knowledge, expertise and initiatives for business innovation	S	P				S	P	S	S	S	S	S		S	P		

Gambar 3. 2 Pemetaan *IT-Related Goals* dengan *Enterprise Goals* (Sumber: ISACA, Enabling Processes, 2012)

3) Pemetaan *IT-Related Process* dan *IT-Related Goals*

Proses pemetaan *IT-Related Process* dan *IT-Related Goals* dilakukan dangan tujuan untuk memilih cakupan proses pada domain DSS yang akan diaudit dangan cara melakukan pemetaan proses pada domain DSS dengan *IT-Related Goals*. Untuk lebih jelasnya terdapat pada gambar 3.3 berikut:

Figure 18—Mapping COBIT 5 IT-related Goals to Processes (cont.)																	
		IT-related Goal															
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
		Alignment of IT and business strategy	IT compliance and support for business compliance with external laws and regulations	Commitment of executive management for making IT-related decisions	Managed IT-related business risk	Realised benefits from IT-enabled investments and services portfolio	Transparency of IT costs, benefits and risk	Delivery of IT services in line with business requirements	Adequate use of applications, information and technology solutions	IT agility	Security of information, processing infrastructure and applications	Optimisation of IT assets, resources and capabilities	Enabling and support of business processes by integrating applications and technology into business processes	Delivery of programmes delivering benefits, on time, on budget, and meeting requirements and quality standards	Availability of reliable and useful information for decision making	IT compliance with internal policies	Competent and motivated business and IT personnel
		06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17			Knowledge, expertise and initiatives for business innovation	
		COBIT 5 Process															Learning and Growth

Domain DSS	IT-Related Goals																	ΣP	ΣS	Nilai Proses
	ITG1	ITG2	ITG3	ITG4	ITG5	ITG6	ITG7	ITG8	ITG9	ITG10	ITG11	ITG12	ITG13	ITG14	ITG15	ITG16	ITG17			
DSS03- Mengelola masalah																				
DSS04- Mengelola keberlanjutan																				
DSS05- Mengelola layanan keamanan																				
DSS06- Mengelola kontrol proses bisnis																				

Penentuan cakupan *process control* diperoleh dari nilai proses diatas 0.15 yang artinya nilai *rating point* kategori *not achieved* (N).

4) Pemetaan Narasumber dengan *RACI Chart*

RACI Chart adalah matriks yang mendeskripsikan peran berbagai pihak dalam melakukan suatu proses bisnis (Cahyani, Aknuranda, & Perdanakusuma, 2018). RACI merupakan akronim dari empat peran yaitu *responsible*, *accountable*, *consulted* dan *informed*. Pengertian *responsible*, *accountable*, *consulted*, dan *informed* sebagai berikut (ISACA, Enabling Processes, 2012):

- a) *Responsible* (R) menunjukkan bagian tersebut merupakan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan dan menyelesaikan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b) *Accountable* (A) menunjukkan bagian tersebut merupakan pihak yang mengarahkan aktivitas, sehingga bagian tersebut yang memperhitungkan kesuksesan aktivitas.

- c) *Consulted* (C) menunjukkan bagian tersebut merupakan pihak yang menyediakan masukan untuk aktivitas yang dikerjakan.
- d) *Informed* (I) menunjukkan bagian tersebut merupakan pihak yang menerima informasi hasil aktivitas atau perlu untuk melanjutkan kegiatan berikutnya.

3.3.5 Wawancara, Observasi dan Pengisian Dokumen Assessment

Wawancara, observasi, pengisian dokumen assessment merupakan cara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan informasi untuk dijadikan data yang selanjutnya akan dikelola dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan *RACI Chart* secara langsung.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk memastikan kevalidan data yang diterima dari hasil wawancara. Pada tahap ini akan dilakukan wawancara kembali untuk mengetahui dokumentasi yang dimiliki. Wawancara dilakukan kepada pemegang otoritas Sirenbang sesuai dengan *RACI Chart* agar memperoleh bukti-bukti yang diperlukan dan memastikan kondisi yang ada (*existing*).

c. Pengisian Dokumen Assessment

Pengisian Dokumen *Assessment* dilakukan setelah mendapatkan data yang diperlukan untuk dijadikan bukti melalui wawancara dan observasi kepada narasumber yang didapatkan sesuai dengan *RACI Chart*, selanjutnya dokumen *assessment* digunakan untuk menentukan *capability level*. Tahap pertama untuk menentukan *capability level* pada proses yang ada dalam domain DSS adalah menentukan penilaian pada *level 1* dengan rumus (rata-rata penjumlahan *base practice* + rata-rata *work products*) / 2 (Faizin, Hariyanti, & Zaman, 2015). Pada tabel 2.2 telah dijelaskan *rating point scale* yang akan digunakan pada penilaian dan digunakan skala angka tertinggi dalam proses perhitungan. Sebagai contoh, lembar kerja audit untuk *process control* DSS01 ditunjukkan pada tabel 3.3:

Tabel 3. 3 Lembar Kerja Audit Bagian *base practice* dan *Work Product* (Sumber: ISACA, COBIT 5: Self Assessment V5, 2013)

	Penilaian	No	Kriteria Praktik	Skor Penilaian	Komentar /Catatan	Kriteria Produk Kerja	Skor Penilaian	Komentar /Catatan
				Kondisi Saat Ini			Kondisi Saat Ini	
PA 1.1 Ketercapaian Proses Ukuran tingkat ketercapaian tujuan proses dan pembuatan produk kerja.	1	a.Berapa persen prosedur operasional non standar yang dijalankan?				Berapa persen produk kerja yang mampu memberikan bukti adanya pencapaian tujuan proses manajemen operasi?		
		b. Berapa persen insiden yang disebabkan oleh masalah operasional?				Produk kerja yang dihasilkan dapat berupa:		
		c.Berapa rasio dari berbagai peristiwa yang terjadi dibandingkan dengan banyaknya insiden?				1. Jadwal manajemen operasional 2. Backup log 3. Aturan monitor aset dan kondisi acara 4. Event logs 5. Tiket insiden 6. Kebijakan lingkungan 7. Laporan polis asuransi 8. Laporan penilaian fasilitas 9. Kesadaran kesehatan dan keselamatan 10. Rencana jaminan		
		d. Berapa persen dari peristiwa operasional yang kritis/penting dapat terdeteksi otomatis oleh sistem deteksi?						

	Penilaian	No	Kriteria Praktik	Skor Penilaian	Komentar /Catatan	Kriteria Produk Kerja	Skor Penilaian	Komentar /Catatan
				Kondisi Saat Ini			Kondisi Saat Ini	
						independen		
Level 2 Diatur	PA 2.1 Manajemen Pelaksanaan Ukuran tingkat manajemen pelaksanaan proses.	2	Berapa persen tujuan dari kinerja proses manajemen operasi yang telah diidentifikasi?			a. Berapa persen dokumentasi proses manajemen operasi yang telah menguraikan ruang lingkup proses? b. Berapa persen rencana proses manajemen operasi yang telah memberikan rincian mengenai tujuan kinerja proses?		
		3	Berapa persen kinerja proses manajemen operasi yang telah direncanakan dan diawasi?			a. Berapa persen rencana proses manajemen operasi yang telah memberikan rincian mengenai tujuan kinerja proses? b. Berapa persen catatan kinerja proses manajemen operasi yang telah		

Penilaian	No	Kriteria Praktik	Skor Penilaian	Komentar /Catatan	Kriteria Produk Kerja	Skor Penilaian	Komentar /Catatan
			Kondisi Saat Ini			Kondisi Saat Ini	
					memberikan rincian hasil/luaran? Catatan: Pada tingkat ini, catatan kinerja proses dapat berupa laporan, daftar kendala, dan catatan tidak resmi.		
	4	Berapa persen kinerja proses manajemen operasi yang telah disesuaikan dengan perencanaan?			Berapa persen catatan kualitas manajemen operasi yang telah memberikan rincian mengenai tindakan yang dilakukan ketika kinerja tidak tercapai?		
	5	Berapa persen tanggung jawab dan wewenang dalam kinerja proses manajemen operasi yang telah didefinisikan, ditugaskan, dan dikomunikasikan?			a. Berapa persen dokumentasi proses manajemen operasi yang telah memberikan rincian mengenai pemilik proses dan siapa yang melakukan, bertanggung jawab, memberi masukan, dan/atau menerima		

Penilaian	No	Kriteria Praktik	Skor Penilaian	Komentar /Catatan	Kriteria Produk Kerja	Skor Penilaian	Komentar /Catatan
			Kondisi Saat Ini			Kondisi Saat Ini	
					<p>informasi mengenai proses tersebut?</p> <p>b. Berapa persen rencana proses manajemen operasi yang telah mencakup rincian mengenai rencana komunikasi komunikasi serta kebutuhan mengenai pengalaman dan kemampuan kinerja proses?</p>		
	6	Berapa persen sumber daya dan informasi yang diperlukan dalam kinerja proses manajemen operasi yang telah diidentifikasi, disediakan, dialokasikan, dan digunakan?			Berapa persen rencana proses manajemen operasi yang telah memberikan rincian mengenai rencana pelatihan proses dan rencana alokasi sumber daya proses?		
	7	Berapa persen hubungan antara pihak-pihak yang terkait yang telah dikelola untuk memastikan komunikasi efektif			<p>a. Berapa persen dokumentasi proses manajemen operasi yang telah memberikan rincian</p>		

Penilaian	No	Kriteria Praktik	Skor Penilaian	Komentar /Catatan	Kriteria Produk Kerja	Skor Penilaian	Komentar /Catatan
			Kondisi Saat Ini			Kondisi Saat Ini	
PA 2.2 Manajemen Produk Kerja Ukuran tingkat manajemen produk kerja yang dihasilkan dari proses	8	dan pemberian tanggung jawab yang jelas terkait proses manajemen operasi yang dijalankan?			mengenai individu dan kelompok yang terlibat (pemasok, pelanggan, RACI) ? b.Berapa persen rencana proses manajemen operasi yang telah memberikan rincian mengenai rencana komunikasi proses?		
		Berapa persen persyaratan/ kebutuhan produk kerja dari kinerja proses manajemen operasi yang telah didefinisikan?			Berapa persen rencana kualitas manajemen operasi yang telah menguraikan rincian mengenai kriteria kualitas, isi, dan struktur produk kerja?		
	9	Berapa persen persyaratan/ kebutuhan untuk dokumentasi dan pengendalian produk kerja dari kinerja proses manajemen operasi yang telah didefinisikan?			a.Berapa persen dokumentasi proses manajemen operasi yang telah menguraikan rincian kendali (matriks kendali)? b.Berapa persen rencana		

Penilaian	No	Kriteria Praktik	Skor Penilaian	Komentar /Catatan	Kriteria Produk Kerja	Skor Penilaian	Komentar /Catatan
			Kondisi Saat Ini			Kondisi Saat Ini	
					kualitas manajemen operasi yang telah memberikan rincian mengenai produk kerja, kriteria kualitas, prasyarat/kebutuhan dokumentasi dan pengendalian perubahan?		
	10	Berapa persen produk kerja manajemen operasi yang telah diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan?			Berapa persen rencana kualitas manajemen operasi yang telah memberikan rincian mengenai produk kerja, kriteria kualitas, persyaratan dokumentasi dan pengendalian perubahan?		

Penilaian	No	Kriteria Praktik	Skor Penilaian	Komentar /Catatan	Kriteria Produk Kerja	Skor Penilaian	Komentar /Catatan
			Kondisi Saat Ini			Kondisi Saat Ini	
	11	Berapa persen produk kerja manajemen operasi yang telah ditinjau berdasarkan perencanaan dan disesuaikan dengan persyaratan/ kebutuhan?			Berapa persen catatan kualitas manajemen operasi yang telah memberikan jejak audit mengenai tinjauan yang dilakukan?		
Level 3 Ditetapkan	PA 3.1 Definisi Proses Ukuran tingkat pemeliharaan proses standar yang mendukung pelaksanaan proses yang terdefinisi.	12	Berapa persen proses standar dan panduan dasar yang telah didefinisikan untuk mendeskripsikan unsur-unsur pokok yang harus ada pada proses manajemen operasi yang dijalankan?		Berapa persen kebijakan dan standar manajemen operasi yang telah memberikan rincian mengenai tujuan organisasi untuk proses, standar minimum kinerja, prosedur standar, serta persyaratan/ kebutuhan pelaporan dan pengawasan? Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak hanya		

Penilaian	No	Kriteria Praktik	Skor Penilaian	Komentar /Catatan	Kriteria Produk Kerja	Skor Penilaian	Komentar /Catatan
			Kondisi Saat Ini			Kondisi Saat Ini	
					keberadaan kebijakan dan standar, tetapi juga penerapannya di seluruh organisasi.		
			13	Berapa persen rangkaian dan interaksi antara proses standar manajemen operasi dengan proses lainnya yang telah ditetapkan?	Berapa persen kebijakan dan standar manajemen operasi yang telah memberikan pemetaan proses dengan rincian proses standar dan urutan serta interaksi yang diharapkan? Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak hanya keberadaan kebijakan dan standar, tetapi juga penerapannya di seluruh organisasi.		
			14	Berapa persen kompetensi dan peran dalam pelaksanaan proses manajemen operasi yang telah diidentifikasi sebagai bagian	Berapa persen kebijakan dan standar manajemen operasi yang telah memberikan rincian peran		

Penilaian	No	Kriteria Praktik	Skor Penilaian	Komentar /Catatan	Kriteria Produk Kerja	Skor Penilaian	Komentar /Catatan
			Kondisi Saat Ini			Kondisi Saat Ini	
		dari proses standar?			dan kompetensi dalam kinerja? Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak hanya keberadaan kebijakan dan standar, tetapi juga penerapannya di seluruh organisasi.		
	15	Berapa persen infrastruktur dan lingkungan kerja dalam pelaksanaan proses manajemen operasi yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar?			Berapa persen kebijakan dan standar manajemen operasi yang telah mengidentifikasi persyaratan minimum infrastruktur dan lingkungan kerja untuk melakukan proses tersebut? Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak hanya keberadaan kebijakan dan standar, tetapi juga penerapannya di seluruh		

Penilaian	No	Kriteria Praktik	Skor Penilaian	Komentar /Catatan	Kriteria Produk Kerja	Skor Penilaian	Komentar /Catatan
			Kondisi Saat Ini			Kondisi Saat Ini	
					organisasi.		
	16	Berapa persen metode yang sesuai dalam pengawasan efektifitas dan kesesuaian proses manajemen operasi yang telah ditetapkan?			<p>a. Berapa persen kebijakan dan standar manajemen operasi yang telah menguraikan rincian mengenai tujuan organisasi untuk proses, standar minimum kinerja, prosedur standar, serta prasyarat/ kebutuhan pelaporan dan pengawasan? Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak hanya keberadaan kebijakan dan standar, tetapi juga penerapannya di seluruh organisasi.</p> <p>b. Berapa persen catatan kualitas dan catatan</p>		

Penilaian	No	Kriteria Praktik	Skor Penilaian	Komentar /Catatan	Kriteria Produk Kerja	Skor Penilaian	Komentar /Catatan
			Kondisi Saat Ini			Kondisi Saat Ini	
PA 3.2 Pelaksanaan Proses Ukuran tingkat efektifitas pelaksanaan proses standar untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan definisi proses.	17	Berapa persen proses manajemen operasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan proses standar?			kinerja proses manajemen operasi yang telah memberikan bukti tinjauan yang dilakukan?		
	18	Berapa persen peran, tanggung jawab, dan wewenang dalam pelaksanaan proses manajemen operasi yang telah ditugaskan dan dikomunikasikan?			Berapa persen kebijakan dan standar manajemen operasi yang telah mendefinisikan standar yang harus diikuti di semua implementasi dari proses? Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak hanya keberadaan kebijakan dan standar, tetapi juga penerapannya di seluruh organisasi.		

Penilaian	No	Kriteria Praktik	Skor Penilaian	Komentar /Catatan	Kriteria Produk Kerja	Skor Penilaian	Komentar /Catatan
			Kondisi Saat Ini			Kondisi Saat Ini	
					kegiatan proses? Persyaratan bukti pada tingkat ini tidak hanya keberadaan kebijakan dan standar, tetapi juga penerapannya di seluruh organisasi.		
	19	Berapa persen personil pelaksana proses manajemen operasi yang merupakan orang berkompeten sesuai dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalamannya?			a. Berapa persen dokumentasi proses manajemen operasi yang telah memberikan rincian kompetensi dan persyaratan pelatihan? b. Berapa persen rencana proses manajemen operasi yang telah mencakup rincian mengenai rencana komunikasi proses, rencana pelatihan dan rencana alokasi sumber daya untuk setiap tahapan		

Penilaian	No	Kriteria Praktik	Skor Penilaian	Komentar /Catatan	Kriteria Produk Kerja	Skor Penilaian	Komentar /Catatan
			Kondisi Saat Ini			Kondisi Saat Ini	
					proses?		
	20	Berapa persen sumber daya dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan proses manajemen operasi yang telah disediakan, dialokasikan, dan digunakan?			Berapa persen rencana proses manajemen operasi yang telah mencakup rincian mengenai rencana alokasi sumber daya untuk setiap tahapan proses?		
	21	Berapa persen infrastruktur dan lingkungan kerja dalam pelaksanaan proses manajemen operasi yang telah disediakan, dikelola, dan dipelihara?			Berapa persen rencana proses manajemen operasi yang telah mencakup rincian mengenai infrastruktur proses dan lingkungan kerja untuk setiap tahapan proses?		
	22	Berapa persen data mengenai kinerja proses manajemen operasi yang telah dikumpulkan dan dianalisa untuk menilai kesesuaian dan efektifitas proses, serta untuk mengevaluasi bagaimana			Berapa persen catatan kualitas dan catatan kinerja proses manajemen operasi yang telah memberikan bukti tinjauan yang dilakukan untuk setiap tahapan proses?		

	Penilaian	No	Kriteria Praktik	Skor Penilaian	Komentar /Catatan	Kriteria Produk Kerja	Skor Penilaian	Komentar /Catatan
				Kondisi Saat Ini			Kondisi Saat Ini	
			perbaikan dapat dilakukan?					
Level 4 Terprediksi	PA 4.1 Pengukuran Proses Ukuran tingkat penggunaan hasil pengukuran dalam penjaminan pelaksanaan proses yang mendukung pencapaian tujuan pelaksanaan proses dan sesuai dengan tujuan bisnis.	23	Berapa persen kebutuhan informasi dari proses manajemen operasi dalam mendukung tujuan bisnis yang telah ditetapkan?			Berapa persen rencana perbaikan proses manajemen operasi yang telah memberikan tujuan perbaikan proses dan tindakan perbaikan yang diusulkan?		
		24	Berapa persen tujuan pengukuran proses manajemen operasi yang berasal dari kebutuhan informasi proses?			Berapa persen rencana pengukuran proses manajemen operasi yang telah memberikan rincian mengenai tujuan pengukuran yang diusulkan?		
		25	Berapa persen sasaran kuantitatif dalam kinerja proses manajemen operasi yang telah ditetapkan?			Berapa persen rencana pengukuran proses manajemen operasi yang telah memberikan rincian mengenai ukuran pengukuran dan indikator yang diusulkan?		

Penilaian	No	Kriteria Praktik	Skor Penilaian	Komentar /Catatan	Kriteria Produk Kerja	Skor Penilaian	Komentar /Catatan
			Kondisi Saat Ini			Kondisi Saat Ini	
	26	Berapa persen ukuran dan frekuensi pengukuran manajemen operasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan tujuan pengukuran proses dan sasaran kuantitatif? Catatan: frekuensi pengukuran diserahkan kembali kepada masing-masing institusi, setidaknya minimal satu kali untuk setiap tahunnya.			Berapa persen rencana pengukuran proses manajemen operasi yang telah memberikan rincian mengenai ukuran pengukuran dan indikator yang diusulkan beserta dengan prosedur pengumpulan data dan prosedur analitis?		
	27	Berapa persen hasil pengukuran dalam pengawasan ketercapaian sasaran kuantitatif proses manajemen operasi yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan dilaporkan?			a. Berapa persen rencana pengukuran proses manajemen operasi yang telah memberikan rincian mengenai prosedur analitis yang diusulkan? b. Berapa persen catatan kinerja proses manajemen operasi yang telah		

Penilaian	No	Kriteria Praktik	Skor Penilaian	Komentar /Catatan	Kriteria Produk Kerja	Skor Penilaian	Komentar /Catatan
			Kondisi Saat Ini			Kondisi Saat Ini	
					memberikan rincian mengenai pengukuran yang telah dikumpulkan dan dianalisis?		
	28	Berapa persen hasil pengukuran manajemen operasi yang telah digunakan untuk verifikasi pencapaian terhadap tujuan pelaksanaan proses?			Berapa persen catatan kinerja proses manajemen operasi yang telah memberikan rincian mengenai pengukuran yang telah dikumpulkan dan dianalisis?		
PA 4.2 Pengendalian Proses Ukuran tingkat pengaturan kuantitatif proses untuk menghasilkan proses yang stabil, mampu, dan terprediksi dalam batasan	29	Berapa persen teknik analisis dan kontrol dalam pengendalian kinerja proses manajemen operasi yang telah ditentukan dan diterapkan?			a. Berapa persen dokumentasi proses manajemen operasi yang telah menguraikan rincian mengenai kendali (matriks kendali)? b. Berapa persen rencana pengendalian proses manajemen operasi yang telah menguraikan pendekatan pengukuran		

Penilaian	No	Kriteria Praktik	Skor Penilaian	Komentar /Catatan	Kriteria Produk Kerja	Skor Penilaian	Komentar /Catatan
			Kondisi Saat Ini			Kondisi Saat Ini	
yang telah ditentukan.					untuk setiap proses?		
	30	Berapa persen parameter dalam pengendalian kinerja normal proses manajemen operasi yang telah ditetapkan?			Berapa persen rencana pengendalian proses manajemen operasi yang telah menguraikan setiap parameter kendali dalam kinerja normal?		
	31	Berapa persen data pengukuran yang telah dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab khusus dalam variasi kinerja proses manajemen operasi?			Berapa persen catatan kinerja proses manajemen operasi yang telah memberikan rincian mengenai pengukuran yang telah dikumpulkan dan dianalisis?		
	32	Berapa persen tindakan korektif yang telah diambil untuk mengatasi penyebab khusus tersebut?			Berapa persen catatan kinerja proses manajemen operasi yang telah memberikan rincian mengenai pengukuran yang telah dikumpulkan dan dianalisis beserta tindakan		

Penilaian	No	Kriteria Praktik	Skor Penilaian	Komentar /Catatan	Kriteria Produk Kerja	Skor Penilaian	Komentar /Catatan
			Kondisi Saat Ini			Kondisi Saat Ini	
					korektif yang dilakukan?		
PA 5.1 Pembaruan Proses Ukuran tingkat identifikasi perubahan proses berdasarkan analisa penyebab umum variasi dalam kinerja dan penyelidikan	33	Berapa persen parameter dalam pengendalian kinerja proses manajemen operasi yang telah ditetapkan kembali (jika diperlukan) setelah pengambilan tindakan korektif?			Berapa persen rencana pengendalian proses manajemen operasi yang telah menguraikan setiap parameter kendali dalam kinerja normal?		
	34	Berapa persen tujuan perbaikan proses manajemen operasi yang mendukung tujuan bisnis yang telah didefinisikan?			Berapa persen rencana perbaikan proses manajemen operasi yang telah memberikan tujuan perbaikan proses dan tindakan perbaikan yang diusulkan?		
	35	Berapa persen data pengukuran yang telah dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum dalam variasi kinerja proses manajemen operasi?			Berapa persen catatan kinerja proses manajemen operasi yang telah memberikan rincian mengenai pengukuran yang telah dikumpulkan dan dianalisis?		

Penilaian	No	Kriteria Praktik	Skor Penilaian	Komentar /Catatan	Kriteria Produk Kerja	Skor Penilaian	Komentar /Catatan
			Kondisi Saat Ini			Kondisi Saat Ini	
pendekatan inovatif dalam pendefinisian dan pelaksanaan proses.	36	Berapa persen data yang telah dianalisis untuk mengidentifikasi peluang perbaikan proses manajemen operasi berdasarkan praktik terbaik dan inovasi?			Berapa persen rencana perbaikan proses manajemen operasi yang telah memberikan rincian mengenai analisis terhadap praktik terbaik?		
	37	Berapa persen peluang perbaikan proses manajemen operasi yang telah diidentifikasi berdasarkan teknologi terbaru dan inovasi konsep proses terkait?			Berapa persen rencana perbaikan proses manajemen operasi yang telah memberikan rincian mengenai analisis peluang peningkatan teknologi?		
	38	Berapa persen strategi implementasi dalam pencapaian tujuan perbaikan proses manajemen operasi yang telah ditetapkan?			Berapa persen rencana perbaikan proses manajemen operasi yang telah menguraikan rincian strategi implementasi untuk perbaikan proses?		
	39	Berapa persen dampak dari seluruh perubahan manajemen operasi yang diusulkan yang telah dinilai terhadap tujuan dan proses standar?			Berapa persen rencana perbaikan proses manajemen operasi yang telah memberikan rincian pendekatan kualitas proyek		
PA 5.2 Optimalisasi Proses Ukuran tingkat pendefinisian,							

	Penilaian	No	Kriteria Praktik	Skor Penilaian	Komentar /Catatan	Kriteria Produk Kerja	Skor Penilaian	Komentar /Catatan
				Kondisi Saat Ini			Kondisi Saat Ini	
	manajemen, dan pelaksanaan dalam perubahan proses secara efektif yang sesuai dengan tujuan perbaikan proses.					perbaikan proses yang diperlukan?		
				40	Berapa persen implementasi dari seluruh perubahan manajemen operasi yang telah dikelola untuk memastikan bahwa setiap gangguan terhadap kinerja proses telah dipahami dan ditindaklanjuti?	Berapa persen rencana perbaikan proses manajemen operasi yang telah menguraikan rincian mengenai strategi implementasi untuk perbaikan proses dan bukti perubahan dalam: - Dokumentasi proses - Rencana kualitas - Kebijakan dan standar		
		41		Berdasarkan kinerja saat ini, berapa persen efektifitas perubahan proses manajemen operasi yang telah dievaluasi terhadap kinerja proses dan tujuan bisnis?		Berapa persen rencana perbaikan proses manajemen operasi yang telah memberikan rincian pendekatan kualitas proyek perbaikan proses yang diperlukan?		

Penilaian pada *level 2* dapat dilakukan ketika *level 1* telah sampai pada *Fully achieved* (F). Sedangkan penilaian pada *level 3* dapat dilakukan ketika *level 2* telah sampai pada *Fully achieved* (F), begitu seterusnya. Penilaian *level 2* hingga 5 menggunakan *generic practices* dan *generic work products*. Berikut adalah contoh *generic practices* dan *generic work products* untuk penilaian *level 2* hingga 5 pada PA 2.1 ditunjukkan pada tabel 3.4:

Tabel 3. 4 *Generic Practice* (GP) dan *Generic Work Product* (GWP) *Process Attribute* (PA) 2.1 (Sumber: ISACA, *Process Assessment Model*, 2013)

Result of Full Achievement of the Attribute	Generic Practices (GPs)	Generic Work Products (GWPs)
Objectives for the performance of the <i>process</i> are identified.	GP 2.1.1 Identify the objectives for the performance of the <i>process</i> . The performance objectives, scoped together with assumptions and constraints, are defined and communicated.	GWP 1.0 <i>Process documentation</i> should outline the <i>process scope</i> . GWP 2.0 <i>Process plan</i> should provide details of the <i>process performance objectives</i> .
Performance of the <i>process</i> is planned and monitored.	GP 2.1.2 Plan and monitor the performance of the <i>process</i> to fulfil the identified objectives. Basic measures of <i>process</i> performance linked to business objectives are established and monitored. They include key milestones, required activities, estimates and schedules.	GWP 2.0 <i>Process plan</i> should provide details of the <i>process performance objectives</i> . GWP 9.0 <i>Process performance records</i> should provide details of the outcomes. Note: At this <i>level</i> , the record of <i>process performance</i> may be in the form of reports, issues registers and informal records.
Performance of the <i>process</i> is adjusted to meet plans.	GP 2.1.3 Adjust the performance of the <i>process</i> . Action is taken when planned performance is not achieved. Actions include identification of <i>process performance issues</i> and adjustment of plans and	GWP 4.0 <i>Quality record</i> should provide details of action taken when performance is not achieved.

Result of Full Achievement of the Attribute	Generic Practices (GPs)	Generic Work Products (GWPs)
	schedules as appropriate.	
Responsibilities and authorities for performing the <i>process</i> are defined, assigned and communicated.	GP 2.1.4 Define responsibilities and authorities for performing the <i>process</i> . The key responsibilities and authorities for performing the key activities of the <i>process</i> are defined, assigned and communicated. The need for <i>process</i> performance experience, knowledge and skills is defined.	GWP 1.0 <i>Process</i> documentation should provide details of the <i>process</i> owner and who is responsible, accountable, consulted and/or informed (RACI). GWP 2.0 <i>Process</i> plan should include details of the <i>process</i> communication plan as well as <i>process</i> performance experience, skills requirement.
Resources and information necessary for performing the <i>process</i> are identified, made available, allocated and used.	GP 2.1.5 Identify and make available resources to perform the <i>process</i> according to plan. Resources and information necessary for performing the key activities of the <i>process</i> are identified, made available, allocated and used.	GWP 2.0 <i>Process</i> plan should provide details of the <i>process</i> training plan and <i>process</i> resourcing plan.
Interfaces between the involved parties are managed to ensure effective communication and clear assignment of responsibility.	GP 2.1.6 Manage the interfaces between involved parties. The individuals and groups involved with the <i>process</i> are identified, responsibilities are defined and effective communication mechanisms are in place.	GWP 1.0 <i>Process</i> documentation should provide details of the individuals and groups involved (suppliers, customers and RACI). GWP 2.0 <i>Process</i> plan should provide details of the <i>process</i> communication plan.

3.3.6 Analisa Hasil Audit

Hasil dari pengisian dokumen *assessment* pada tabel 3.3 dan tabel 3.4, akan diperoleh *Rating Scale* pada setiap *level*. Apabila suatu *level* mencapai nilai F (*Fully Achieved*) atau L (*Largely Achieved*), maka *capability level* akan dikatakan memenuhi. Sedangkan apabila suatu *level* mencapai P (*Partially Achieved*) atau N (*Not Achieved*), maka tidak dapat dikatakan memenuhi *capability level*, sehingga mengikuti *level* satu tingkat lebih rendah dibawahnya (ISACA, Process Assessment Model, 2013). *Rating scale* tersebut dimasukkan ke dalam tabel tersendiri pada tabel penilaian. Contoh tabel penilaian ditunjukkan pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3. 5 Hasil Penilaian *Capability Level* DSS01

Seluruh tabel penilaian akan direkap menjadi satu tabel yang berisi penilaian dari seluruh proses pada domain DSS. Tabel penilaian keseluruhan ditunjukkan oleh tabel 3.6 berikut:

Tabel 3. 6 Hasil Akhir Penilaian Audit

	Problems								
DSS04	Manage Continuity								
DSS05	Manage Security Services								
DSS06	Manage Business <i>Process</i> Controls								

3.3.7 Analisa Rekomendasi Hasil Audit

Rekomendasi diperoleh berdasarkan nilai *gap capability level* antara *capability level existing* dan *capability level target* organisasi. Kemudian dibuat suatu rekomendasi sesuai dengan keadaan yang ingin dicapai dari Sirenbang. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat digunakan oleh BAPPEDA Jember untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rekomendasi yang diberikan merujuk kepada kerangka kerja COBIT 5.

3.3.8 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan berisi rangkuman dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran berisi masukan bagi penelitian selanjutnya berdasarkan kesimpulan.

BAB 5. PENUTUP

Bab ini berisi tentang rekomendasi dan saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan merupakan ringkasan penelitian secara keseluruhan. Saran merupakan masukan untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan kesimpulan dan saran dapat membantu penelitian selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil audit berupa *existing capability level* pada Sirenbang memperoleh *level 0 (incomplete process)* dan *level 1 (performed process)*. DSS01 memperoleh *level 1* karena matrik pada *base practice* dan *work products* pada *level 1* terpenuhi sedangkan DSS02, DSS03, DSS04, DSS05 dan DSS06 memperoleh *level 0* karena matrik pada *base practice* dan *work products* pada *level 1* tidak terpenuhi.
2. *Level target* Sirenbang adalah 2 (*managed process*) pada semua domain DSS sehingga diperoleh nilai *gap* pada DSS01 sebesar -1 serta DSS02, DSS03, DSS04, DSS05 dan DSS06 sebesar -2.
3. Rekomendasi diperoleh setelah analisa nilai *gap* antara *existing capability level* dan *level target*. Secara umum, rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh pengelola Sirenbang sebagai berikut:
 - a. Membuat sistem untuk mendeteksi kegiatan operasional secara keseluruhan termasuk akses pada jaringan sehingga dapat mencegah penerobosan yang dilakukan oleh perangkat ilegal.
 - b. Membuat kebijakan proses bisnis berbentuk SOP agar menambah efektivitas kerja dan dapat menjadi panduan bagi karyawan.
 - c. Mengadakan pelatihan kepada seluruh karyawan terkait pemulihan data, prosedur dan tanggung jawab, insiden dan masalah yang sebelumnya telah direncanakan.

- d. Mengadakan pengujian terkait pemulihan data, prosedur dan tanggung jawab, insiden dan masalah kepada seluruh karyawan sehingga dapat menambah efektivitas kerja sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ada.
- e. Membuat kebijakan terkait manajemen operasional, manajemen permintaan layanan dan insiden, manajemen masalah, manajemen keberlangsungan, manajemen keamanan layanan dan manajemen kontrol proses bisnis berisi tentang perencanaan, tujuan dan pengawasan.
- f. Membuat dokumen berisi tentang rencana, definisi tujuan termasuk sumber daya yang dibutuhkan dan laporan kinerja proses terkait manajemen operasional, manajemen permintaan layanan dan insiden, manajemen masalah, manajemen keberlangsungan, manajemen keamanan layanan dan manajemen kontrol proses bisnis untuk mencegah kejadian yang mungkin terjadi, serta untuk memastikan proses manajemen terkait dijalankan sesuai dengan perencanaan.
- g. Membuat dokumen berisi tentang produk kerja secara rinci dan kriteria kualitas produk kerja terkait terkait manajemen operasional, manajemen permintaan layanan dan insiden, manajemen masalah, manajemen keberlangsungan, manajemen keamanan layanan dan manajemen kontrol proses bisnis serta laporan untuk tiap produk kerja. Laporan digunakan untuk evaluasi kedepannya agar sesuai dengan perencanaan.

5.2 Saran

Saran yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian sejenis dengan tema dan topik yang sama terkait dengan Sirenbang Kabupaten Jember menggunakan COBIT 5 domain DSS dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dari penelitian tersebut dapat diketahui bagaimana perkembangan Sirenbang Kabupaten Jember. Penelitian juga dapat dilakukan dengan menggunakan *framework* yang berbeda atau *framework* yang

sama dengan domain berbeda sehingga dari penelitian tersebut dapat dijadikan pembanding serta memperkaya hasil penelitian terkait objek penelitian yaitu Sirenbang Kabupaten Jember.



DAFTAR PUSTAKA

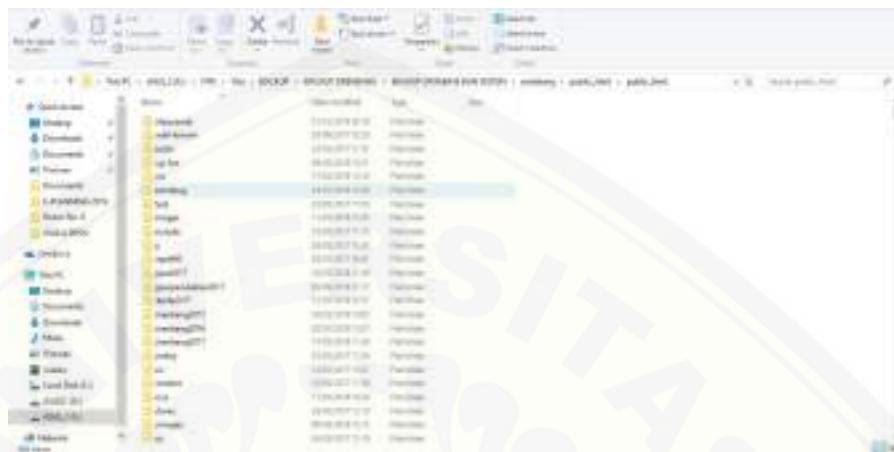
- Al-Rasyid, A. (2015). *Analisis Audit Sistem Informasi Berbasis COBIT 5 Pada Domain Deliver, Service, and Support (DSS) (Studi Kasus: SIM-BL di Unit CDC PT Telkom Pusat. Tbk)*. Bandung: Universitas Telkom.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiningsih, S. (2004). *Efisiensi dan Faktor Internal Eksternal Agroindustri Gula Kelapa di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Cahyani, U., Aknuranda, I., & Perdanakusuma, A. R. (2018). Evaluasi Layanan BPJSTK Mobile Dengan Menggunakan Domain Deliver, Service and Support Berdasarkan Framework COBIT 5 (Studi Kasus : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mataram). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 2382-2391.
- Davis, F. D. (1986). *Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information System Theory and Results*. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
- Doll, W. J., & Torkzadeh, G. (1988). The Measurement of End-User Computing Satisfaction. *MIS Quarterly*.
- Faizin, I. N., Hariyanti, E., & Zaman, B. (2015). Pembangunan Tools Audit Sistem Informasi Berdasarkan COBIT 5 pada DOmain Align, Plan and Organize. *Jurnal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, 73-78.
- Hsu, S. (2014). Effects of Organization Culture, Organizational Learning and IT Strategy on Knowledge Management and Performance. *The Journal of International Management Studies*, 9, 50-58.
- International Organization for Standardization. (2008). *Corporate Governance of Information Technology, ISO/IEC 38500:2008*. Geneva: International Organization for Standardization.
- ISACA. (2012). *COBIT 5: A Business Framework for The Governance and Management of Enterprise IT*. USA: IT Governance Intitute.
- ISACA. (2012). *Enabling Processes*. USA: IT Governance Intitute.
- ISACA. (2013). *COBIT 5: Self Assessment V5*. USA.
- ISACA. (2013). *Process Assessment Model*. USA: IT Governance Intitute.
- Jaferian, S., & Rezvani, M. (2014). Export New Product Success: The Impact of Market and Technology Orientation. . *International Journal of Management. Accounting and Economics* , 322-337.

- Jogiyanto. (2011). *Pedoman Survey Kuesioner*. Yogyakarta: BPFE.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 27 tahun 1980 . (n.d.). *Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta.
- Mangkunegara, P. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nakata, C., Zhu, Z., & Kraimer, M. L. (2008). The Complex Contribution of Information Technology Capability to Business Performance. *Journal of Managerial Issues*, 20, 485-506.
- Nuratmojo, A., Darwiyanto, E., & Ary, G. A. (2015). *Penerapan COBIT 5 DSS untuk audit infrastruktur TI FMS PT Grand Indonesia*. Bandung.
- Pasquini, A. (2013). COBIT 5 and the Process Capability Model. *Improvements Provided for IT Governance Process*.
- Sawyer. (2005). *Sawyer's Internal Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, T. D. (2016). *Manajemen Layanan Teknologi Informasi*. Surabaya: Asosiasi Sistem Informasi Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004. (n.d.). *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta.
- Zhang, M., & Sarker, S. (2008). Unpacking the effect of IT capability. *Information System Journal*, 18(4), 357-380.

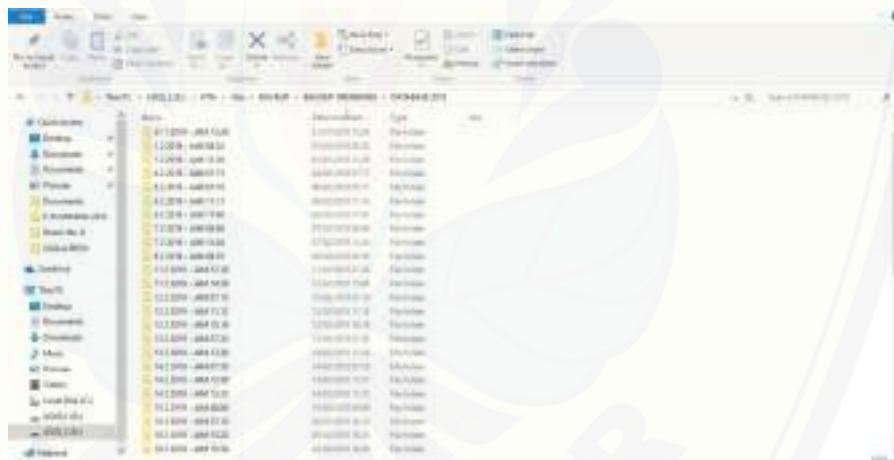
LAMPIRAN

A. Generic Work Products

A.1 Backup Log

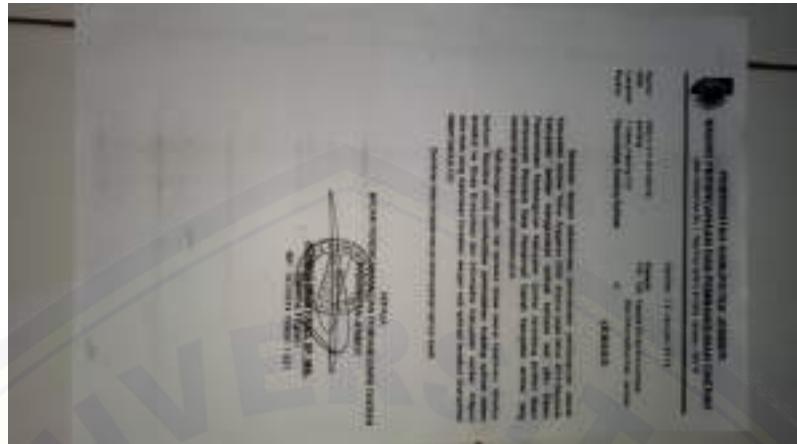


Backup Sistem



Backup Database

A.2 Permintaan Layanan yang Disetujui dan Permintaan Layanan yang Terpenuhi



A.3 Event Log dan Catatan Transaksi

LAPORAN USULAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN AWAL TAHUN 2020

KODE	URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	LOKASI	SASARAN	USULAN ANGGARAN
I.01	PENDIDIKAN				4.090.000.000
I.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				4.090.000.000
I.01.16.12	Pembangunan Perpusatakan Sekolah				240.000.000
1	Pembangunan Perpustakaan SDN Nogosari 05	1.00 lokal	Kec. Rambipuji	Pembangunan Perpustakaan SDN Nogosari 05	120.000.000
2	Pembangunan Perpustakaan SDN Rambipuji 02	1.00 lokal	Kec. Rambipuji	Pembangunan Perpustakaan SDN Rambipuji 02	120.000.000
I.01.16.3	Penambahan Ruang Kelas Sekolah				500.000.000
1	Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Rambigundan 02	3.00 RKB	Kec. Rambipuji	Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Rambigundan 02	250.000.000
2	Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Kaliwining 05	3.00 RKB	Kec. Rambipuji	Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Kaliwining 05	250.000.000
I.01.16.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah				3.350.000.000
1	Rehab Sedang/Berat SDN Kaliwining 06	4.00 lokal	Kec. Rambipuji	Rehab Sedang/Berat SDN Kaliwining 06	225.000.000
2	Rehab berat SDN Kaliwining 05	2.00 lokal	Kec. Rambipuji	Rehab berat SDN Kaliwining 05	130.000.000
3	Rehab berat SDN Nogosari 03	3.00 lokal	Kec. Rambipuji	Rehab berat SDN Nogosari 03	250.000.000
4	Rehab berat SDN Nogosari 07	5.00 lokal	Kec. Rambipuji	Rehab berat SDN Nogosari 07	425.000.000
5	Rehab berat SDN Rowotamtu 02	1.00 lokal	Kec. Rambipuji	Rehab berat SDN Rowotamtu 02	75.000.000
6	Rehab berat SDN Kaliwining 03	5.00 lokal	Kec. Rambipuji	Rehab berat SDN Kaliwining 03	425.000.000
7	Rehab berat SDN Kaliwining 07	3.00 lokal	Kec. Rambipuji	Rehab berat SDN Kaliwining 07	120.000.000
8	Rehab berat SDN Nogosari 02	2.00 lokal	Kec. Rambipuji	Rehab berat SDN Nogosari 02	225.000.000
9	Rehab berat SDN Pecoro 2	3.00 lokal	Kec. Rambipuji	Rehab berat SDN Pecoro 2	350.000.000
10	Rehab berat SDN Curah Malang I	2.00 lokal	Kec. Rambipuji	Rehab berat SDN Curah Malang I	225.000.000
11	Rehab berat SDN Rowotamtu 03	3.00 lokal	Kec. Rambipuji	Rehab berat SDN Rowotamtu 03	325.000.000
12	Rehab berat SDN Rambigundam 03	3.00 lokal	Kec. Rambipuji	Rehab berat SDN Rambigundam 03	325.000.000
13	Rehab berat SDN Gugut 02	2.00 lokal	Kec. Rambipuji	Rehab berat SDN Gugut 02	250.000.000
I.02	KESEHATAN				380.000.000
I.02.48	Program Upaya Kesehatan Kerja dan Penyehatan Lingkungan				380.000.000
I.02.48.2	Upaya Kesehatan Lingkungan				380.000.000
1	Pembuatan IPAL Puskesmas Rambipuji	1.00 unit	Kec. Rambipuji	Pembuatan IPAL Puskesmas Rambipuji	80.000.000
2	Pembuatan Incinerator (penghancur Limbah Medis padat) Puskemas Rambipuji	1.00 unit	Kec. Rambipuji	Pembuatan Incinerator (penghancur Limbah Medis padat) Puskemas Rambipuji	150.000.000
3	Pembuatan Incinerator (penghancur limbah medis padat) Puskesmas Rambipuji	1.00 unit	Kec. Rambipuji	Pembuatan Incinerator (penghancur limbah medis padat) Puskesmas Rambipuji	150.000.000
I.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				232.637.200.000
I.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				220.950.000.000
I.03.15.10	Pembangunan/Peningkatan Jembatan				4.500.000.000
1	Peningkatan Jalan ke Hotmix dari pertigaan SDN 02 s/d Jembatan	450.00 m	Kec. Rambipuji	Peningkatan Jalan ke Hotmix dari pertigaan SDN 02 s/d Jembatan	500.000.000
2	Pembangunan Jembatan Nogosari - Rotamtu	50.00 m	Kec. Rambipuji	Pembangunan Jembatan Nogosari - Rotamtu	900.000.000
3	Pembangunan Jembatan Layang Sari	20.00 m	Kec. Rambipuji	Pembangunan Jembatan Layang Sari	800.000.000

KODE	URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	LOKASI	SASARAN	USULAN ANGGARAN
4	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DUSUN BEDADUNG WETAN Desa KALIWINING	50.00 m	Kec. Rambipuji	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DUSUN BEDADUNG WETAN Desa KALIWINING	500.000.000
5	PEMBANGUNAN JEMBATAN KE LOJI LOR DUSUN BEDADUNG WETAN Desa Kaliwining	15.00 m	Kec. Rambipuji	PEMBANGUNAN JEMBATAN KE LOJI LOR DUSUN BEDADUNG WETAN Desa Kaliwining	500.000.000
6	Pemb. Jembatan Tambelang Dsn. Bindung Desa Pecoro	10.00 m	Kec. Rambipuji	Pemb. Jembatan Tambelang Dsn. Bindung Desa Pecoro	800.000.000
7	Pembangunan Jembatan Dusun Satrean Rambigundam – Gugut	25.00 m	Kec. Rambipuji	Pembangunan Jembatan Dusun Satrean Rambigundam – Gugut	500.000.000
I.03.15.9	Peningkatan Jalan				216.450.000.000
1	Peningkatan Jl. Dalam Kota	19014.00 m2	Kec. Rambipuji	Peningkatan Jl. Dalam Kota	40.000.000.000
2	Peningkatan Jl. Curahmalang-Gumukbago	6558.00 m2	Kec. Rambipuji	Peningkatan Jl. Curahmalang-Gumukbago	80.000.000.000
3	Peningkatan Jl. Kaliwining - Rambipuji	13713.00 m2	Kec. Rambipuji	Peningkatan Jl. Kaliwining - Rambipuji	80.000.000.000
4	Peningkatan Jl. Gayam - Terminal Tawang Alun	1800.00 m2	Kec. Rambipuji	Peningkatan Jl. Gayam - Terminal Tawang Alun	400.000.000
5	Peningkatan Jl. Curahsuko - Tunggusari	8892.00 m2	Kec. Rambipuji	Peningkatan Jl. Curahsuko - Tunggusari	1.000.000.000
6	Peningkatan Jl. Pecoro - Curahmeluwo	5220.00 mq	Kec. Rambipuji	Peningkatan Jl. Pecoro - Curahmeluwo	1.000.000.000
7	Peningkatan Jl. Pecoro-Gugut-Rambigundam	19251.00 m2	Kec. Rambipuji	Peningkatan Jl. Pecoro-Gugut-Rambigundam	1.500.000.000
8	Peningkatan Jl. Nogosari - Renteng	19500.00 m2	Kec. Rambipuji	Peningkatan Jl. Nogosari - Renteng	2.000.000.000
9	Peningkatan Jl. Rowotamtu-Nogosari-Curahmalang	19062.00 m2	Kec. Rambipuji	Peningkatan Jl. Rowotamtu-Nogosari-Curahmalang	400.000.000
10	Peningkatan Jl. Karanganyar - Rowotamtu	7500.00 m2	Kec. Rambipuji	Peningkatan Jl. Karanganyar - Rowotamtu	1.000.000.000
11	Peningkatan Jl. Rowotamtu-Petung	6300.00 m2	Kec. Rambipuji	Peningkatan Jl. Rowotamtu-Petung	400.000.000
12	Peningkatan Jl. Kaliwining - Jubung	6000.00 m2	Kec. Rambipuji	Peningkatan Jl. Kaliwining - Jubung	1.000.000.000
13	Peningkatan Jl. Dharmawangsa V	4725.00 m2	Kec. Rambipuji	Peningkatan Jl. Dharmawangsa V	1.000.000.000
14	Peningkatan Jl. Gg.Bentoel	4500.00 m2	Kec. Rambipuji	Peningkatan Jl. Gg.Bentoel	1.000.000.000
15	Peningkatan Jl. Kaliwining - Nogosari	16062.00 m2	Kec. Rambipuji	Peningkatan Jl. Kaliwining - Nogosari	2.000.000.000
16	Peningkatan Jalan Hotmix dari Perempatan Makam ke Perbatasan Kaliwining	1500.00 m2	Kec. Rambipuji	Peningkatan Jalan Hotmix dari Perempatan Makam ke Perbatasan Kaliwining	800.000.000
17	Peningkatan Jalan Hotmix (Dari Jembatan Bedadung s/d Pasar Nogosari)	1085.00 m2	Kec. Rambipuji	Peningkatan Jalan Hotmix (Dari Jembatan Bedadung s/d Pasar Nogosari)	800.000.000
18	Peningkatan Jalan Lapan ke Hot mix (dari AS-Syafi'i s/d Jln. Paving)	300.00 m2	Kec. Rambipuji	Peningkatan Jalan Lapan ke Hot mix (dari AS-Syafi'i s/d Jln. Paving)	500.000.000
19	Peningkatan Jalan Pecoro – Gugut	5000.00 m2	Kec. Rambipuji	Peningkatan Jalan Pecoro – Gugut	850.000.000
20	Peningkatan Jalan Argopuro Desa Rambigundam	1500.00 m2	Kec. Rambipuji	Peningkatan Jalan Argopuro Desa Rambigundam	800.000.000
I.03.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong				4.770.000.000
I.03.16.3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong				4.770.000.000
1	Pembangunan Drainase Lingkungan Puskesmas Nogosari	500.00 m	Kec. Rambipuji	Pembangunan Drainase Lingkungan Puskesmas Nogosari	300.000.000
2	Drainase Curahmluwo Pasar Sapi Desa Rowotamtu	300.00 m	Kec. Rambipuji	Drainase Curahmluwo Pasar Sapi Desa Rowotamtu	300.000.000
3	Pembangunan Draenase Jalan Durian Desa Pecoro	500.00 m	Kec. Rambipuji	Pembangunan Draenase Jalan Durian Desa Pecoro	200.000.000
4	Rehap Draenase Jalan Rambutan Desa Pecoro	500.00 m	Kec. Rambipuji	Rehap Draenase Jalan Rambutan Desa Pecoro	400.000.000
5	Pembangunan Drainase Curahmluwo Kebonan Desa Rowotamtu	200.00 m	Kec. Rambipuji	Pembangunan Drainase Curahmluwo Kebonan Desa Rowotamtu	100.000.000
6	Pembangunan Drainase dari Perbatasan Kaliwing- Nogosari s/d Perbatasan Nogosari -Glundengan	5000.00 m	Kec. Rambipuji	Pembangunan Drainase dari Perbatasan Kaliwing- Nogosari s/d Perbatasan Nogosari -Glundengan	850.000.000
7	Pembangunan Saluran Drainase dari Perbatasan Rowotamtu s/d selatan Balai Desa Curahmalang	2000.00 m	Kec. Rambipuji	Pembangunan Saluran Drainase dari Perbatasan Rowotamtu s/d selatan Balai Desa Curahmalang	800.000.000

KODE	URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	LOKASI	SASARAN	USULAN ANGGARAN
8	Pembangunan Saluran Drainase Krajan Pulo Desa Rowotamtu	250.00 m	Kec. Rambipuji	Pembangunan Saluran Drainase Krajan Pulo Desa Rowotamtu	100.000.000
9	Pembangunan Saluran Drainase Tepi Jalan sebelah barat Dusun Glagasan Desa Rowotamtu	200.00 m	Kec. Rambipuji	Pembangunan Saluran Drainase Tepi Jalan sebelah barat Dusun Glagasan Desa Rowotamtu	120.000.000
10	Pembangunan Draenase sepanjang jalan Mangun Sarkoro Rambipuji	300.00 m	Kec. Rambipuji	Pembangunan Draenase sepanjang jalan Mangun Sarkoro Rambipuji	200.000.000
11	Pembangunan Draenase sepanjang jalan Mangunsarkoro Rambipuji	1000.00 m	Kec. Rambipuji	Pembangunan Draenase sepanjang jalan Mangunsarkoro Rambipuji	500.000.000
12	Pembangunan Draenase depan kantor Camat Rambipuji	500.00 m	Kec. Rambipuji	Pembangunan Draenase depan kantor Camat Rambipuji	100.000.000
13	Pembangunan Draenase Jalan Argopuro Desa Rambigundam	1.00 m	Kec. Rambipuji	Pembangunan Draenase Jalan Argopuro Desa Rambigundam	500.000.000
14	Pembangunan Draenase depan Ponpes - Dsn Krajan Desa Gugut	1.00 m	Kec. Rambipuji	Pembangunan Draenase depan Ponpes - Dsn Krajan Desa Gugut	300.000.000
1.03.17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong				100.000.000
1.03.17.3	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong				100.000.000
1	Pembangunan Plengsengan dekat Pos Paud Bougenville 37	80.00 m2	Kec. Rambipuji	Pembangunan Plengsengan dekat Pos Paud Bougenville 37	100.000.000
1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				1.270.000.000
1.03.24.10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi				1.270.000.000
1	Perbaikan Saluran B.mk 2 kiri Desa Kaliwining	300.00 m2	Kec. Rambipuji	Perbaikan Saluran B.mk 2 kiri Desa Kaliwining	200.000.000
2	Perbaikan Saluran Cangkring Desa Pecoro	300.00 m2	Kec. Rambipuji	Perbaikan Saluran Cangkring Desa Pecoro	200.000.000
3	Perbaikan Saluran 3 B.kl 5 kanan Desa Gugut	300.00 m2	Kec. Rambipuji	Perbaikan Saluran 3 B.kl 5 kanan Desa Gugut	200.000.000
4	Perbaikan Saluran Sumber Dawuhan Desa Pecoo	300.00 m2	Kec. Rambipuji	Perbaikan Saluran Sumber Dawuhan Desa Pecoo	200.000.000
5	Perbaikan Saluran BCD 4 kiri Desa Curahmalang	400.00 m2	Kec. Rambipuji	Perbaikan Saluran BCD 4 kiri Desa Curahmalang	200.000.000
6	Rehap Saluran BPT. 7 Kiri Desa Pecoro;	300.00 m2	Kec. Rambipuji	Rehap Saluran BPT. 7 Kiri Desa Pecoro;	120.000.000
7	Rehap Saluran BPT. 11 Kiri Desa Pecoro;	300.00 m2	Kec. Rambipuji	Rehap Saluran BPT. 11 Kiri Desa Pecoro;	150.000.000
1.03.38	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di Lingkungan Permukiman				1.577.200.000
1.03.38.1	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan				1.577.200.000
1	Pavingisasi Halaman Masjid Nurul Hidayah Desa Gugut	100.00 m2	Kec. Rambipuji	Pavingisasi Halaman Masjid Nurul Hidayah Desa Gugut	22.000.000
2	Pavingisasi Halaman Masjid Nurul Yaqin Dsn Jereng Barat Desa Gugut	100.00 m2	Kec. Rambipuji	Pavingisasi Halaman Masjid Nurul Yaqin Dsn Jereng Barat Desa Gugut	22.000.000
3	Pavingisasi Halaman Masjid Baitur Rohman Dsn Jereng Barat Desa Gugut	100.00 m2	Kec. Rambipuji	Pavingisasi Halaman Masjid Baitur Rohman Dsn Jereng Barat Desa Gugut	22.000.000
4	Pavingisasi halaman Masjid Ky. Agung Senadin Dsn Jereng Barat Desa Gugut	100.00 m2	Kec. Rambipuji	Pavingisasi halaman Masjid Ky. Agung Senadin Dsn Jereng Barat Desa Gugut	50.000.000
5	Pavingisasi dari Jembatan - Pemakaman Umum Dsn Krajan Desa Gugut	450.00 m2	Kec. Rambipuji	Pavingisasi dari Jembatan - Pemakaman Umum Dsn Krajan Desa Gugut	99.000.000
6	Pavingisasi jalan ke Pemakaman RT 02 RW 01 Dsn Jereng Barat Desa Gugut	450.00 m2	Kec. Rambipuji	Pavingisasi jalan ke Pemakaman RT 02 RW 01 Dsn Jereng Barat Desa Gugut	99.000.000
7	Pavingisasi Jalan Menuju Lapangan Dsn Jereng Timur Desa Gugut	600.00 m2	Kec. Rambipuji	Pavingisasi Jalan Menuju Lapangan Dsn Jereng Timur Desa Gugut	132.000.000
8	Paving Gang Musholla Dusun Glagasan Desa Rowotamtu	210.00 m2	Kec. Rambipuji	Paving Gang Musholla Dusun Glagasan Desa Rowotamtu	46.200.000
9	paving RT. 004 Dusun Paseban Desa Rowotamtu	300.00 m2	Kec. Rambipuji	paving RT. 004 Dusun Paseban Desa Rowotamtu	80.000.000
10	Pavingisasi di RT 02 RW 017 Dusun Kidul Pasar Desa Rambipuji	1500.00 m2	Kec. Rambipuji	Pavingisasi di RT 02 RW 017 Dusun Kidul Pasar Desa Rambipuji	80.000.000

KODE	URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	LOKASI	SASARAN	USULAN ANGGARAN
I 1	Pavingisasi di RW 10/RW 02 Dusun curah Ancar Desa Rambipuji	250.00 m2	Kec. Rambipuji	Pavingisasi di RW 10/RW 02 Dusun curah Ancar Desa Rambipuji	90.000.000
I 2	Paving RT 004/RW 25 Dusun Gudang Rejo Desa Rambipuji	150.00 m2	Kec. Rambipuji	Paving RT 004/RW 25 Dusun Gudang Rejo Desa Rambipuji	50.000.000
I 3	Pavingisasi Gg. Swadaya II RW 018 Dusun Krajan Desa Rambipuji	200.00 m2	Kec. Rambipuji	Pavingisasi Gg. Swadaya II RW 018 Dusun Krajan Desa Rambipuji	85.000.000
I 4	Paving RT.05,/RW.06 Dusun Gayam Desa Kaliwining	300.00 m2	Kec. Rambipuji	Paving RT.05,/RW.06 Dusun Gayam Desa Kaliwining	100.000.000
I 5	Paving RT.02,/RW.21 Dusun Loji Kidul Sawah Desa Kaliwining	456.00 m2	Kec. Rambipuji	Paving RT.02,/RW.21 Dusun Loji Kidul Sawah Desa Kaliwining	100.000.000
I 6	Paving Dsn.Curah Suko (RT.09,RW.16) Desa Kaiwining	400.00 m2	Kec. Rambipuji	Paving Dsn.Curah Suko (RT.09,RW.16) Desa Kaiwining	100.000.000
I 7	Paving Dsn.Curah Banteng RT.05,RW.24 Desa Kaliwining	900.00 m2	Kec. Rambipuji	Paving Dsn.Curah Banteng RT.05,RW.24 Desa Kaliwining	100.000.000
I 8	Pavingsasi Halaman Kantor Camat Rambipuji	500.00 m2	Kec Rambipuji	Pavingsasi Halaman Kantor Camat Rambipuji	300.000.000
I.03.43	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Penerangan Jalan Umum				220.000.000
I.03.43. I	Peningkatan/Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)				220.000.000
1	PJU Depan Masjid Jami Rambipuji	2.00 buah	Kec. Rambipuji	PJU Depan Masjid Jami Rambipuji	20.000.000
2	Pengadaan PJU di Krajan Lor – Gayam Desa Rambigundam	20.00 buah	Kec. Rambipuji	Pengadaan PJU di Krajan Lor – Gayam Desa Rambigundam	100.000.000
3	Pembangunan PJU Dusun Dukuhsia Desa Rambigundam	10.00 buah	Kec. Rambipuji	Pembangunan PJU Dusun Dukuhsia Desa Rambigundam	100.000.000
I.03.47	Program Pembangunan / Rehabilitasi Bangunan Gedung				600.000.000
I.03.47.7	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara				600.000.000
1	Pembangunan Pagar Kantor Camat Rambipuji	400.00 m	Kec Rambipuji	Pembangunan Pagar Kantor Camat Rambipuji	500.000.000
2	Pembangunan Gudang Arsip Kantor Camat Rambipuji	50.00 m2	Kec Rambipuji	Pembannagunan Gudang Arsip Kantor Camat Rambipuji	100.000.000
I.03.49	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong di Lingkungan Permukiman				100.000.000
I.03.49. I	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong di Lingkungan Permukiman				100.000.000
1	Pembuatan Saluran Draenase Kantor Camat Rambipuji	300.00 m	Kec Rambipuji	Pembuatan Saluran Draenase Kantor Camat Rambipuji	100.000.000
I.03.53	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air				2.700.000.000
I.03.53.3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Drainase, dan Bangunan Pelengkap				2.700.000.000
1	Perbaikan Saluran Irigasi Dusun Curahmluw Desa Rowotamtu	200.00 m	Kec Rambipuji	Perbaikan Saluran Irigasi Dusun Curahmluw Desa Rowotamtu	200.000.000
2	Perbaikan Saluran B.mk 1 kiri 1 Desa Kaliwining	300.00 m	Kec. Rambipuji	Perbaikan Saluran B.mk 1 kiri 1 Desa Kaliwining	200.000.000
3	Perbaikan Saluran B.mk 2 kanan hilir Desa Rambipuji	400.00 m	Kec. Rambipuji	Perbaikan Saluran B.mk 2 kanan hilir Desa Rambipuji	200.000.000
4	Perbaikan Saluran B.mk 2 kiri Desa Kaliwining	300.00 m	Kec Rambipuji	Perbaikan Saluran B.mk 2 kiri Desa Kaliwining	200.000.000
5	Perbaikan Saluran Cangkring Desa Pecoro	300.00 m	Kec Rambipuji	Perbaikan Saluran Cangkring Desa Pecoro	200.000.000
6	Perbaikan Saluran 3 B.kl 5 kanan Desa Gugut	300.00 m	Kec Rambipuji	Perbaikan Saluran 3 B.kl 5 kanan Desa Gugut	200.000.000
7	Perbaikan Saluran Sumber Dawuhan Desa Pecoro	300.00 m	Kec Rambipuji	Perbaikan Saluran Sumber Dawuhan Desa Pecoro	200.000.000
8	Perbaikan Saluran BCD 4 kiri Desa Curahmalang	300.00 m	Kec Rambipuji	Perbaikan Saluran BCD 4 kiri Desa Curahmalang	200.000.000
9	Rehabilitasi Saluran 2 Candi Desa Curahmalang	300.00 m	Kec Rambipuji	Rehabilitasi Saluran 2 Candi Desa Curahmalang	200.000.000
10	Perbaikan Saluran B.cd 2 Kanan Desa Curahmalang	300.00 m	Kec Rambipuji	Perbaikan Saluran B.cd 2 Kanan Desa Curahmalang	200.000.000
11	Perbaikan Slauran B.cd 2 kiri Desa Curahmalang	300.00 m	Kec Rambipuji	Perbaikan Slauran B.cd 2 kiri Desa Curahmalang	200.000.000

KODE	URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	LOKASI	SASARAN	USULAN ANGGARAN
I 2	Rehabilitasi Saluran II Tapen Desa Gugut	300.00 m	Kec Rambipuji	Rehabilitasi Saluran II Tapen Desa Gugut	200.000.000
I 3	Saluran Afur Karang Anyar Desa Rowotamtu	200.00 m	Kec Rambipuji	Saluran Afur Karang Anyar Desa Rowotamtu	100.000.000
I 4	Rehabilitasi Dam Tapen Desa Gugut	300.00 m	Kec Rambipuji	Rehabilitasi Dam Tapen Desa Gugut	200.000.000
1.03.54	Program Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air				350.000.000
1.03.54.4	Pengendalian Operasi Jaringan Irigasi				350.000.000
1	Perbaikan Pintu Air Dam Makam Desa Rambigundam	1.00 buah	Kec Rambipuji	Perbaikan Pintu Air Dam Makam Desa Rambigundam	150.000.000
2	Pembangunan Pintu Air di 4 Lokasi Desa Pecoro	4.00 buah	Kec Rambipuji	Pembangunan Pintu Air di 4 Lokasi Desa Pecoro	200.000.000
1.06	SOSIAL				40.000.000
1.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				40.000.000
1.06.15.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin				40.000.000
1	Pengadaan Gerobak Kopi	8.00 buah	Kec. Rambipuji	Pengadaan Gerobak Kopi	40.000.000
2.01	KETENAGAKERJAAN				174.000.000
2.01.20	Program Pelatihan Dan Perluasan Kerja				174.000.000
2.01.20.7	Wira Usaha Baru Melalui Pelatihan Kewirausahaan				174.000.000
1	Pelatihan Pembuatan Kue;	8.00 desa	Kec. Rambipuji	Pelatihan Pembuatan Kue;	24.000.000
2	Pelatihan Tata Rias	30.00 orang	Kec Rambipuji	Pelatihan Tata Rias	150.000.000
2.05	LINGKUNGAN HIDUP				800.000.000
2.05.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				200.000.000
2.05.2.18	Pengadaan/Pembangunan Taman				200.000.000
1	Pembangunan Taman Kantor Camat Rambipuji	100.00 m ²	Kec Rambipuji	Pembangunan Taman Kantor Camat Rambipuji	200.000.000
2.05.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				600.000.000
2.05.24.5	Penataan RTH				500.000.000
1	Pembuatan RTH di tanah negara dekat Bulog Pecoro (sebelah barat)	500.00 m ²	Kec Rambipuji	Pembuatan RTH di tanah negara dekat Bulog Pecoro (sebelah barat)	500.000.000
2.05.24.6	Pemeliharaan RTH				100.000.000
1	Pemeliharaan RTH Kec Rambipuji	1.00 tahun	Kec Rambipuji	Pemeliharaan RTH Kec Rambipuji	100.000.000
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				710.000.000
2.07.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				10.000.000
2.07.16.2	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa				10.000.000
1	Pelatihan Pengurus BUMDES	2.00 kali	Kec. Rambipuji	Pelatihan Pengurus BUMDES	10.000.000
2.07.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa				100.000.000
2.07.17.5	Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan				100.000.000
1	Pembangunan Kecamatan sebagai sentra penjualan produk Lokal UMK se Kab. Jember	1.00 tahun	Kec. Rambipuji	Pembangunan Kecamatan sebagai sentra penjualan produk Lokal UMK se Kab. Jember	100.000.000
2.07.21	Program Pemberdayaan Perekonomian Pedesaan (P4)				500.000.000
2.07.21.1	Revitalisasi Pasar Desa (RPD)				500.000.000

KODE	URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	LOKASI	SASARAN	USULAN ANGGARAN
1	Pembangunan Pasar Desa Gladak Kudung Desa Rambigundam	1.00 unit	Kec Rambipuji	Pembangunan Pasar Desa Gladak Kudung Desa Rambigundam	500.000.000
2.07.22	Program Peningkatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna				100.000.000
2.07.22.6	Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pedesaan (P2UP)				100.000.000
1	Pelatihan Pembuatan Kue se Kecamatan Rambipuji	2.00 kali	Kec Rambipuji	Pelatihan Pembuatan Kue se Kecamatan Rambipuji	100.000.000
2.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				226.800.000
2.08.18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri				58.800.000
2.08.18.1	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB				9.000.000
1	Pembinaan Pokja Kampung KB	2.00 desa	Kec. Rambipuji	Pembinaan Pokja Kampung KB	9.000.000
2.08.18.2	Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD)				49.800.000
1	Pembinaan PPKBD / SUB	1.00 tahun	Kec. Rambipuji	Pembinaan PPKBD / SUB	49.800.000
2.08.19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat				132.000.000
2.08.19.1	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat				132.000.000
1	Pembinaan Poktan BKB	5280.00 orang	Kec. Rambipuji	Pembinaan Poktan BKB	132.000.000
2.08.26	Program Generasi Berencana				36.000.000
2.08.26.02	Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga Remaja				36.000.000
1	Pembinaan Poktan BKR	1.00 tahun	Kec. Rambipuji	Pembinaan Poktan BKR	36.000.000
2.09	PERHUBUNGAN				100.000.000
2.09.19	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas				100.000.000
2.09.19.6	Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu-lintas				100.000.000
1	Pengadaan Alat Cross Ligh di Depan SMP.SMA Muhammadiyah Rambipuji	2.00 buah	Kec Rambipuji	Pengadaan Alat Cross Ligh di Depan SMP.SMA Muhammadiyah Rambipuji	50.000.000
2	Pengadaan Cross Light di Pertigaan Jalan Pasar Rambipuji	2.00 buah	Kec Rambipuji	Pengadaan Cross Light di Pertigaan Jalan Pasar Rambipuji	50.000.000
2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				800.000.000
2.10.23	Program Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Desa/Kelurahan Berbasis IT				800.000.000
2.10.23.1	Pengembangan Desa/Kelurahan Online				800.000.000
1	Pengembangan Desa On Line	8.00 desa	Kec. Rambipuji	Pengembangan Desa On Line	800.000.000
2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				72.000.000
2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				72.000.000
2.11.16.6	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan				72.000.000
1	Pelatihan Pembuatan Tahu dan Tempe	8.00 desa	Kec Rambipuji	Pelatihan Pembuatan Tahu dan Tempe	24.000.000
2	Pelatihan Tata Rias	8.00 desa	Kec. Rambipuji	Pelatihan Tata Rias	24.000.000
3	Pelatihan Menjahit	8.00 desa	Kec. Rambipuji	Pelatihan Menjahit	24.000.000
2.16	KEBUDAYAAN				20.000.000
2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				20.000.000

KODE	URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	LOKASI	SASARAN	USULAN ANGGARAN
2.16.17.1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah				20.000.000
1	Sarana Kesenian Jaranan dusun Paseban Desa Rowotamtu	5.00 unit	Kec. Rambipuji	Sarana Kesenian Jaranan dusun Paseban Desa Rowotamtu	10.000.000
2	Sarana Kesenian Hadroh dusun Paseban Desa Rowotamtu	1.00 unit	Kec. Rambipuji	Sarana Kesenian Hadroh dusun Paseban Desa Rowotamtu	10.000.000
3.03	PERTANIAN				98.000.000
3.03.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan				70.000.000
3.03.18.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna				46.000.000
1	Pengadaan Hand Sprayer Elektrik	40.00 buah	Kec. Rambipuji	Pengadaan Hand Sprayer Elektrik	34.000.000
2	Pengadaan Peralatan Pembuatan Agensi Hayati (pestisida hayati)	8.00 buah	Kec. Rambipuji	Pengadaan Peralatan Pembuatan Agensi Hayati (pestisida hayati)	12.000.000
3.03.18.5	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna				24.000.000
1	Pelatihan Pembuatan Agen Hayati Trico derma, Paeni bacillius, Matarizium	8.00 kali	Kec. Rambipuji	Pelatihan Pembuatan Agen Hayati Trico derma, Paeni bacillius, Matarizium	24.000.000
3.03.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				28.000.000
3.03.19.2	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan				28.000.000
1	Pengadaan Pompa Air 3 dim	8.00 buah	Kec. Rambipuji	Pengadaan Pompa Air 3 dim	28.000.000
3.06	PERDAGANGAN				1.000.000.000
3.06.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar				1.000.000.000
3.06.21.1	Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Pasar				1.000.000.000
1	Pembangunan Pasar Gladak Kudung Desa Rambigundam	300.00 m2	Kec. Rambipuji	Pembangunan Pasar Gladak Kudung Desa Rambigundam	300.000.000
2	Pembangunan Pasar Hewan Krajan Lor Desa Rambigundam	200.00 m2	Kec. Rambipuji	Pembangunan Pasar Hewan Krajan Lor Desa Rambigundam	200.000.000
3	Pembangunan Pasar Hewan Desa Rambigundam	1.00 unit	Kec. Rambipuji	Pembangunan Pasar Hewan Desa Rambigundam	300.000.000
4	Rehab Berat Pasar Hewan Desa Rambigundam	200.00 m2	Kec. Rambipuji	Rehab Berat Pasar Hewan Desa Rambigundam	200.000.000
4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				560.000.000
4.01.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				460.000.000
4.01.2.13	Pengadaan Pavingisasi dan Pagar Kantor				300.000.000
1	Pembuatan Pagar Kantor Camat Rambipuji	300.00 m2	Kec. Rambipuji	Pembuatan Pagar Kantor Camat Rambipuji	100.000.000
2	Pavingsai Halaman Kantor Camat Rambipuji	500.00 m2	Kec. Rambipuji	Pavingsai Halaman Kantor Camat Rambipuji	200.000.000
4.01.2.14	Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dll				60.000.000
1	Pengadaan Komputer All in One (AIO) Kantor Camat Rambipuji	6.00 buah	Kec. Rambipuji	Pengadaan Komputer All in One (AIO) Kantor Camat Rambipuji	60.000.000
4.01.2.19	Pengadaan Bangunan Lainnya				100.000.000
1	Pembuatan Gudang Arsip Kantor Camat Rambipuji	36.00 m2	KEC. RAMBIPUJI	Pembuatan Gudang Arsip Kantor Camat Rambipuji	100.000.000
4.01.27	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				100.000.000
4.01.27.1	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa				100.000.000
1	Pelatihan Pengurus BUMDES	2.00 kali	Kec. Rambipuji	Pelatihan Pengurus BUMDES	100.000.000

Digital Repository Universitas Jember

LAPORAN USULAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN VERIFIKASI KECAMATAN RAMBIPUJI TAHUN 2020

Kode	KECAMATAN/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	LOKASI	SUMBER DANA					USULAN
				APBDKAB	APBDPROV	APBNDAK	APBNDKON	APBNTP	
KECAMATAN RAMBIPUJI									
1.01	PENDIDIKAN			4.090.000.000	0	0	0	0	
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			4.090.000.000	0	0	0	0	
1.01.16.12	Pembangunan Perpusatakan Sekolah			240.000.000	0	0	0	0	
I.	Pembangunan Perpustakaan SDN Nogosari 05 Sasaran : Pembangunan Perpustakaan SDN Nogosari 05	1.00 lokal	Kec. Rambipuji	120.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PENDIDIKAN									
2.	Pembangunan Perpustakaan SDN Rambipuji 02 Sasaran : Pembangunan Perpustakaan SDN Rambipuji 02	1.00 lokal	Kec. Rambipuji	120.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PENDIDIKAN									
1.01.16.3	Penambahan Ruang Kelas Sekolah			500.000.000	0	0	0	0	
I.	Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Rambigundan 02 Sasaran : Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Rambigundan 02	3.00 RKB	Kec. Rambipuji	250.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PENDIDIKAN									
2.	Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Kaliwining 05 Sasaran : Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Kaliwining 05	3.00 RKB	Kec. Rambipuji	250.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PENDIDIKAN									
1.01.16.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah			3.350.000.000	0	0	0	0	
I.	Rehab Sedang/Berat SDN Kaliwining 06 Sasaran : Rehab Sedang/Berat SDN Kaliwining 06	4.00 lokal	Kec. Rambipuji	225.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PENDIDIKAN									
2.	Rehab berat SDN Kaliwining 05 Sasaran : Rehab berat SDN Kaliwining 05	2.00 lokal	Kec. Rambipuji	130.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PENDIDIKAN									
3.	Rehab berat SDN Nogosari 03 Sasaran : Rehab berat SDN Nogosari 03	3.00 lokal	Kec. Rambipuji	250.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PENDIDIKAN									
4.	Rehab berat SDN Nogosari 07 Sasaran : Rehab berat SDN Nogosari 07	5.00 lokal	Kec. Rambipuji	425.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PENDIDIKAN									
5.	Rehab berat SDN Rowotamtu 02 Sasaran : Rehab berat SDN Rowotamtu 02	1.00 lokal	Kec. Rambipuji	75.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PENDIDIKAN									
6.	Rehab berat SDN Kaliwining 03 Sasaran : Rehab berat SDN Kaliwining 03	5.00 lokal	Kec. Rambipuji	425.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan

Digital Repository Universitas Jember

Kode	KECAMATAN/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	LOKASI	SUMBER DANA					USULAN
				APBDKAB	APBDPROV	APBNDAK	APBNDKON	APBNTP	
SKPD : DINAS PENDIDIKAN									
7.	Rehab berat SDN Kaliwining 07 Sasaran : Rehab berat SDN Kaliwining 07	3.00 lokal	Kec. Rambipuji	120.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PENDIDIKAN									
8.	Rehab berat SDN Nogosari 02 Sasaran : Rehab berat SDN Nogosari 02	2.00 lokal	Kec. Rambipuji	225.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PENDIDIKAN									
9.	Rehab berat SDN Pecoro 2 Sasaran : Rehab berat SDN Pecoro 2	3.00 lokal	Kec. Rambipuji	350.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PENDIDIKAN									
10.	Rehab berat SDN Curah Malang I Sasaran : Rehab berat SDN Curah Malang I	2.00 lokal	Kec. Rambipuji	225.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PENDIDIKAN									
11.	Rehab berat SDN Rowotamtu 03 Sasaran : Rehab berat SDN Rowotamtu 03	3.00 lokal	Kec. Rambipuji	325.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PENDIDIKAN									
12.	Rehab berat SDN Rambigundam 03 Sasaran : Rehab berat SDN Rambigundam 03	3.00 lokal	Kec. Rambipuji	325.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PENDIDIKAN									
13.	Rehab berat SDN Gugut 02 Sasaran : Rehab berat SDN Gugut 02	2.00 lokal	Kec. Rambipuji	250.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PENDIDIKAN									
1.02	KESEHATAN			380.000.000	0	0	0	0	
1.02.48	Program Upaya Kesehatan Kerja dan Penyehatan Lingkungan			380.000.000	0	0	0	0	
1.02.48.2	Upaya Kesehatan Lingkungan			380.000.000	0	0	0	0	
3.	Pembuatan IPAL Puskesmas Rambipuji Sasaran : Pembuatan IPAL Puskesmas Rambipuji	1.00 unit	Kec. Rambipuji	80.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS KESEHATAN									
4.	Pembuatan Incinerator (penghancur Limbah Medis padat) Puskesmas Rambipuji Sasaran : Pembuatan Incinerator (penghancur Limbah Medis padat) Puskesmas Rambipuji	1.00 unit	Kec. Rambipuji	150.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS KESEHATAN									
5.	Pembuatan Incinerator (penghancur limbah medis padat) Puskesmas Rambipuji Sasaran : Pembuatan Incinerator (penghancur limbah medis padat) Puskesmas Rambipuji	1.00 unit	Kec. Rambipuji	150.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS KESEHATAN									
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			231.267.200.00	0	0	0	0	
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			220.950.000.00	0	0	0	0	
1.03.15.10	Pembangunan/Peningkatan Jembatan			4.500.000.000	0	0	0	0	

Digital Repository Universitas Jember

KODE	KECAMATAN/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	LOKASI	SUMBER DANA					USULAN
				APBDKAB	APBDPROV	APBNDAK	APBNDKON	APBNTP	
1.	Peningkatan Jalan ke Hotmix dari pertigaan SDN 02 s/d jembatan Sasaran : Peningkatan Jalan ke Hotmix dari pertigaan SDN 02 s/d jembatan	450.00 m	Kec. Rambipuji	500.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
2.	Pembangunan Jembatan Nogosari - Rotamu Sasaran : Pembangunan jembatan Nogosari-Rotamu	50.00 m	Kec. Rambipuji	900.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
3.	Pembangunan Jembatan Layang Sari Sasaran : Pembangunan Jembatan Layang Sari	20.00 m	Kec. Rambipuji	800.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
4.	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DUSUN BEDADUNG WETAN Desa KALIWINING Sasaran : PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DUSUN BEDADUNG WETAN Desa KALIWINING	50.00 m	Kec. Rambipuji	500.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
5.	PEMBANGUNAN JEMBATAN KE LOJI LOR DUSUN BEDADUNG WETAN Desa Kaliwining Sasaran : PEMBANGUNAN JEMBATAN KE LOJI LOR DUSUN BEDADUNG WETAN Desa Kaliwining	15.00 m	Kec. Rambipuji	500.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
6.	Pemb. Jembatan Tambelang Dsn. Bindung Desa Pecoro Sasaran : Pemb. Jembatan Tambelang Dsn. Bindung Desa Pecoro	10.00 m	Kec. Rambipuji	800.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
7.	Pembangunan Jembatan Dusun Satrean Rambigundam – Gugut Sasaran : Pembangunan Jembatan Dusun Satrean Rambigundam – Gugut	25.00 m	Kec. Rambipuji	500.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
1.03.15.9	Peningkatan Jalan			216.450.000.000	0	0	0	0	
1.	Peningkatan Jl. Dalam Kota Sasaran : Peningkatan Jl. Dalam Kota	19014.00 m2	Kec. Rambipuji	40.000.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
2.	Peningkatan Jl. Curahmalang-Gumukbago Sasaran : Peningkatan Jl. Curahmalang-Gumukbago	6558.00 m2	Kec. Rambipuji	80.000.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
3.	Peningkatan Jl. Kaliwining - Rambipuji Sasaran : Peningkatan Jl. Kaliwining - Rambipuji	13713.00 m2	Kec. Rambipuji	80.000.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
4.	Peningkatan Jl. Gayam - Terminal Tawang Alun Sasaran : Peningkatan Jl. Gayam - Terminal Tawang Alun	1800.00 m2	Kec. Rambipuji	400.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan

Digital Repository Universitas Jember

Digital Repository Universitas Jember

Kode	KECAMATAN/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	LOKASI	SUMBER DANA					USULAN
				APBDKAB	APBDPROV	APBNDAK	APBNDKON	APBNTP	
17.	Peningkatan Jalan Hotmix (Dari Jembatan Bedadung s/d Pasar Nogosari) Sasaran : Peningkatan Jalan Hotmix (Dari Jembatan Bedadung s/d Pasar Nogosari)	1085.00 m2	Kec. Rambipuji	800.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
18.	Peningkatan Jalan Lapan ke Hot mix (dari AS-Syafi'i s/d Jln. Paving) Sasaran : Peningkatan Jalan Lapan ke Hot mix (dari AS-Syafi'i s/d Jln. Paving)	300.00 m2	Kec. Rambipuji	500.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
19.	Peningkatan Jalan Pecoro – Gugut Sasaran : Peningkatan Jalan Pecoro – Gugut	5000.00 m2	Kec. Rambipuji	850.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
20.	Peningkatan Jalan Argopuro Desa Rambigundam Sasaran : Peningkatan Jalan Argopuro Desa Rambigundam	1500.00 m2	Kec. Rambipuji	800.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
1.03.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong			4.770.000.000	0	0	0	0	
1.03.16.3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong			4.770.000.000	0	0	0	0	
1.	Pembangunan Drainase Lingkungan Puskesmas Nogosari Sasaran : Pembangunan Drainase Lingkungan Puskesmas Nogosari	500.00 m	Kec. Rambipuji	300.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
2.	Drainase Curahmluwo Pasar Sapi Desa Rowotamtu Sasaran : Drainase Curahmluwo Pasar Sapi Desa Rowotamtu	300.00 m	Kec. Rambipuji	300.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
3.	Pembangunan Draenase Jalan Durian Desa Pecoro Sasaran : Pembangunan Draenase Jalan Durian Desa Pecoro	500.00 m	Kec. Rambipuji	200.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
4.	Rehab Draenase Jalan Rambutan Desa Pecoro Sasaran : Rehab Draenase Jalan Rambutan Desa Pecoro	500.00 m	Kec. Rambipuji	400.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
5.	Pembangunan Drainase Curahmluwo Kebonan Desa Rowotamtu Sasaran : Pembangunan Drainase Curahmluwo Kebonan Desa Rowotamtu	200.00 m	Kec. Rambipuji	100.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
6.	Pembangunan Drainase dari Perbatasan Kalwing-Nogosari s/d Perbatasan Nogosari -Glundengan Sasaran : Pembangunan Drainase dari Perbatasan Kalwing- Nogosari s/d Perbatasan Nogosari -Glundengan	5000.00 m	Kec. Rambipuji	850.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan

Digital Repository Universitas Jember

KODE	KECAMATAN/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	LOKASI	SUMBER DANA					USULAN
				APBDKAB	APBDPROV	APBNDAK	APBNDKON	APBNTP	
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
7.	Pembangunan Saluran Drainase dari Perbatasan Rowotamtu s/d selatan Balai Desa Curahmalang Sasaran : Pembangunan Saluran Drainase dari Perbatasan Rowotamtu s/d selatan Balai Desa Curahmalang	2000.00 m	Kec. Rambipuji	800.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
8.	Pembangunan Saluran Drainase Krajan Pulo Desa Rowotamtu Sasaran : Pembangunan Saluran Drainase Krajan Pulo Desa Rowotamtu	250.00 m	Kec. Rambipuji	100.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
9.	Pembangunan Saluran Drainase Tepi Jalan sebelah barat Dusun Glagasan Desa Rowotamtu Sasaran : Pembangunan Saluran Drainase Tepi Jalan sebelah barat Dusun Glagasan Desa Rowotamtu	200.00 m	Kec. Rambipuji	120.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
10.	Pembangunan Draenase sepanjang jalan Mangun Sarkoro Rambipuji Sasaran : Pembangunan Draenase sepanjang jalan Mangun Sarkoro Rambipuji	300.00 m	Kec. Rambipuji	200.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
11.	Pembangunan Draenase sepanjang jalan Mangunsarkoro Rambipuji Sasaran : Pembangunan Draenase sepanjang jalan Mangunsarkoro Rambipuji	1000.00 m	Kecamatan Rambipuji	500.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
12.	Pembangunan Draenase depan kantor Camat Rambipuji Sasaran : Pembangunan Draenase depan kantor Camat Rambipuji	500.00 m	Kec. Rambipuji	100.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
13.	Pembangunan Draenase Jalan Argopuro Desa Rambigundam Sasaran : Pembangunan Draenase Jalan Argopuro Desa Rambigundam	1.00 m	Kec. Rambipuji	500.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
14.	Pembangunan Draenase depan Ponpes - Dsn Krajan Desa Gugut Sasaran : Pembangunan Draenase depan Ponpes - Dsn Krajan Desa Gugut	1.00 m	Kec. Rambipuji	300.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
1.03.38	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di Lingkungan Permukiman			1.577.200.000	0	0	0	0	
1.03.38.1	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan			1.577.200.000	0	0	0	0	

Digital Repository Universitas Jember

KODE	KECAMATAN/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	LOKASI	SUMBER DANA					USULAN
				APBDKAB	APBDPROV	APBNDAK	APBNDKON	APBNTP	
1.	Pavingisasi Halaman Masjid Nurul Hidayah Desa Gugut Sasaran : Pavingisasi Halaman Masjid Nurul Hidayah Desa Gugut	100.00 m2	Kec. Rambipuji	22.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA									
2.	Pavingisasi Halaman Masjid Nurul Yaqin Dsn Jereng Barat Desa Gugut Sasaran : Pavingisasi Halaman Masjid Nurul Yaqin Dsn Jereng Barat Desa Gugut	100.00 m2	Kec. Rambipuji	22.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA									
3.	Pavingisasi Halaman Masjid Baitur Rohman Dsn Jereng Barat Desa Gugut Sasaran : Pavingisasi Halaman Masjid Baitur Rohman Dsn Jereng Barat Desa Gugut	100.00 m2	Kec. Rambipuji	22.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA									
4.	Pavingisasi halaman Masjid Ky. Agung Senadin Dsn Jereng Barat Desa Gugut Sasaran : Pavingisasi halaman Masjid Ky. Agung Senadin Dsn Jereng Barat Desa Gugut	100.00 m2	Kec. Rambipuji	50.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA									
5.	Pavingisasi dari Jembatan - Pemakaman Umum Dsn Krajan Desa Gugut Sasaran : Pavingisasi dari Jembatan - Pemakaman Umum Dsn Krajan Desa Gugut	450.00 m2	Kec. Rambipuji	99.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA									
6.	Pavingisasi jalan ke Pemakaman RT 02 RW 01 Dsn Jereng Barat Desa Gugut Sasaran : Pavingisasi jalan ke Pemakaman RT 02 RW 01 Dsn Jereng Barat Desa Gugut	450.00 m2	Kec. Rambipuji	99.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA									
7.	Pavingisasi Jalan Menuju Lapangan Dsn Jereng Timur Desa Gugut Sasaran : Pavingisasi Jalan Menuju Lapangan Dsn Jereng Timur Desa Gugut	600.00 m2	Kec. Rambipuji	132.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA									
8.	Paving Gang Musholla Dusun Glagasan Desa Rowotamtu Sasaran : Paving Gang Musholla Dusun Glagasan Desa Rowotamtu	210.00 m2	Kec. Rambipuji	46.200.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA									
9.	paving RT. 004 Dusun Paseban Desa Rowotamtu Sasaran : paving RT. 004 Dusun Paseban Desa Rowotamtu	300.00 m2	Kec. Rambipuji	80.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA									
10.	Pavingisasi di RT 02 RW 017 Dusun Kidul Pasar Desa Rambipuji Sasaran : Pavingisasi di RT 02 RW 017 Dusun Kidul Pasar Desa Rambipuji	1500.00 m2	Kec. Rambipuji	80.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan

Digital Repository Universitas Jember

Digital Repository Universitas Jember

Digital Repository Universitas Jember

Kode	KECAMATAN/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	LOKASI	SUMBER DANA					USULAN
				APBDKAB	APBDPROV	APBNDAK	APBNDKON	APBNTP	
14.	Rehabilitasi Dam Tapen Desa Gugut Sasaran : Rehabilitasi Dam Tapen Desa Gugut	300.00 m	Kec Rambipuji	200.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
1.03.54	Program Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			350.000.000	0	0	0	0	
1.03.54.4	Pengendalian Operasi Jaringan Irigasi			350.000.000	0	0	0	0	
I.	Perbaikan Pintu Air Dam Makam Desa Rambigundam Sasaran : Perbaikan Pintu Air Dam Makam Desa Rambigundam	1.00 buah	Kec Rambipuji	150.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
2.	Pembangunan Pintu Air di 4 Lokasi Desa Pecoro Sasaran : Pembangunan Pintu Air di 4 Lokasi Desa Pecoro	4.00 buah	Kec Rambipuji	200.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
1.06	SOSIAL			40.000.000	0	0	0	0	
1.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			40.000.000	0	0	0	0	
1.06.15.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin			40.000.000	0	0	0	0	
I.	Pengadaan Gerobak Kopi Sasaran : Pengadaan Gerobak Kopi	8.00 buah	Kec. Rambipuji	40.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS SOSIAL									
2.05	LINGKUNGAN HIDUP			600.000.000	0	0	0	0	
2.05.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			600.000.000	0	0	0	0	
2.05.24.5	Penataan RTH			500.000.000	0	0	0	0	
I.	Pembuatan RTH di tanah negara dekat Bulog Pecoro (sebelah barat) Sasaran : Pembuatan RTH di tanah negara dekat Bulog Pecoro (sebelah barat)	500.00 m2	Kec Rambipuji	500.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
2.05.24.6	Pemeliharaan RTH			100.000.000	0	0	0	0	
I.	Pemeliharaan RTH Kec Rambipuji Sasaran : Pemeliharaan RTH Kec Rambipuji	1.00 tahun	Kec Rambipuji	100.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			500.000.000	0	0	0	0	
2.07.21	Program Pemberdayaan Perekonomian Pedesaan (P4)			500.000.000	0	0	0	0	
2.07.21.1	Revitalisasi Pasar Desa (RPD)			500.000.000	0	0	0	0	

Digital Repository Universitas Jember

Kode	KECAMATAN/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	LOKASI	SUMBER DANA					USULAN
				APBDKAB	APBDPROV	APBNDAK	APBNDKON	APBNTP	
I.	Pembangunan Pasar Desa Gladak Kudung Desa Rambigundam Sasaran : Pembangunan Pasar Desa Gladak Kudung Desa Rambigundam	1.00 unit	Kec Rambipuji	500.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			226.800.000	0	0	0	0	
2.08.18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri			58.800.000	0	0	0	0	
2.08.18.1	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB			9.000.000	0	0	0	0	
I.	Pembinaan Pokja Kampung KB Sasaran : Pembinaan Pokja Kampung KB	2.00 desa	Kec. Rambipuji	9.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.08.18.2	Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD)			49.800.000	0	0	0	0	
I.	Pembinaan PPKBD / SUB Sasaran : Pembinaan PPKBD / SUB	1.00 tahun	Kec. Rambipuji	49.800.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.08.19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat			132.000.000	0	0	0	0	
2.08.19.1	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat			132.000.000	0	0	0	0	
I.	Pembinaan Poktan BKB Sasaran : Pembinaan Poktan BKB	5280.00 orang	Kec. Rambipuji	132.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.08.26	Program Generasi Berencana			36.000.000	0	0	0	0	
2.08.26.02	Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga Remaja			36.000.000	0	0	0	0	
I.	Pembinaan Poktan BKR Sasaran : Pembinaan Poktan BKR	1.00 tahun	Kec. Rambipuji	36.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.09	PERHUBUNGAN			100.000.000	0	0	0	0	
2.09.19	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas			100.000.000	0	0	0	0	
2.09.19.6	Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu-lintas			100.000.000	0	0	0	0	
I.	Pengadaan Alat Cross Ligth di Depan SMP.SMA Muhammadiyah Rambipuji Sasaran : Pengadaan Alat Cross Ligth di Depan SMP.SMA Muhammadiyah Rambipuji	2.00 buah	Kec Rambipuji	50.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN									
2.	Pengadaan Cross Light di Pertigaan Jalan Pasar Rambipuji Sasaran : Pengadaan Cross Light di Pertigaan Jalan Pasar Rambipuji	2.00 buah	Kec Rambipuji	50.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan

Digital Repository Universitas Jember

Digital Repository Universitas Jember

Kode	KECAMATAN/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	LOKASI	SUMBER DANA					USULAN
				APBDKAB	APBDPROV	APBNDAK	APBNDKON	APBNTP	
2.	Pengembangan Wisata Gunung Gong Dusun Kaliputih Desa Rambipuji Sasaran : Pengembangan Wisata Gunung Gong Dusun Kaliputih Desa Rambipuji	1.00 paket	Kec. Rambipuji	0	100.000.000	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN									
3.	Pengembangan Wisata Susur Sungai Bedadung Desa Kaliwining Sasaran : Pengembangan Wisata Susur Sungai Bedadung Desa Kaliwining	1.00 paket	Kec. Rambipuji	0	100.000.000	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN									
3.03	PERTANIAN			98.000.000	0	0	0	0	
3.03.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			70.000.000	0	0	0	0	
3.03.18.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna			46.000.000	0	0	0	0	
I.	Pengadaan Hand Sprayer Elektrik Sasaran : Pengadaan Hand Sprayer Elektrik	40.00 buah	Kec. Rambipuji	34.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN									
2.	Pengadaan Peralatan Pembuatan Agensi Hayati (pestisida hayati) Sasaran : Pengadaan Peralatan Pembuatan Agensi Hayati (pestisida hayati)	8.00 buah	Kec. Rambipuji	12.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN									
3.03.18.5	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna			24.000.000	0	0	0	0	
I.	Pelatihan Pembuatan Agen Hayati Trico derma, Paeni bacillius, Matarizium Sasaran : Pelatihan Pembuatan Agen Hayati Trico derma, Paeni bacillius, Matarizium	8.00 kali	Kec. Rambipuji	24.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN									
3.03.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			28.000.000	0	0	0	0	
3.03.19.2	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan			28.000.000	0	0	0	0	
I.	Pengadaan Pompa Air 3 dim Sasaran : Pengadaan Pompa Air 3 dim	8.00 buah	Kec. Rambipuji	28.000.000	0	0	0	0	musrenbang kecamatan
SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN									
TOTAL ANGGARAN				238.170.000.00	300.000.000	0	0	0	

A.4 Kebijakan dan Tujuan Kelangsungan Bisnis



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran perlu penataan kembali struktur tugas, fungsi perangkat daerah;
b. bahwa dalam rangka memperbaiki menyusulkan, struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya perlu melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sertu Tata Kerja Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI JEMBER KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

RAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
8. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

-3-

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Aset;
 2. Sub Bagian Program; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi:

- 4 -

1. Sub Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Industri;
 2. Sub Bidang Pertanian dan Pangan; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM;
 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Pembangunan SDM; dan
 3. Sub Bidang Kependudukan.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan:
 1. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan SDA;
 2. Sub Bidang Transportasi; dan
 3. Sub Bidang Perumahan, Pemukiman, Sanitasi dan Air Bersih.
 - f. Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's:
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Data Pembangunan dan Evaluasi Program SDG's; dan
 3. Sub Bidang Evaluasi Target Pembangunan Daerah.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, perlengkapan dan aset, kepegawaian, penyusunan program, keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, perlengkapan dan aset, kepegawaian dan keuangan;
 - b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;

- 5 -

- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. pengordinasian kegiatan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- g. pengordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Bappeda;
- h. pengordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja.

**Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Aset
Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Umum dan Aset mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan-sifat menyurat, kearsipan dan penggandaan naskah-naskah dinas;
 - b. melaksanakan urusan jumlah tanggap perlengkapan, administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - d. melaksanakan penyusunan kebutuhan barang pakai habis, perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengantaran, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris Bappeda;
 - e. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas Bappeda;
 - g. menyiapkan dan melakukan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian, produk hukum dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Bappeda;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Aset mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian surat dinas, penggandaan naskah dinas dan kearsipan Badan;
 - b. pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik badan;

- 6 -

- c. pengurusan kendaraan dan alat pengangkutan lain milik Badan;
- d. pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan, rapat dinas dan perjalanan dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- e. penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan peralatan kantor;
- f. pelaksanaan tata usaha barang perlengkapan dan peralatan kantor;
- g. pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan, pengudangan serta pemeliharaan barang perlengkapan dan peralatan;
- h. penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang perlengkapan dan peralatan kantor;
- i. penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh Badan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran, perlengkapan dan peralatan kantor;
- k. penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumuman datakepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berdasar sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- l. pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, pembinaan karier dan pensiun pegawai;
- m. penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai;
- n. pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- o. penyusunan rencana dan usulan kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi tugas Bappeda; dan
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sub bagian.

**Paragraf 2
Sub Bagian Program
Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Progam mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan program dan pelaporan Bappeda;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana jangka pendek dan menengah Bappeda;
 - c. melakukan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda;

- 7 -

- d. menghimpun datadan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran Bappeda;
 - e. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan danperundang-undangan;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan Bappeda;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi meliputi:
- a. pelaksanaan Musrenbang (RPPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Bappeda;
 - c. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya;
 - d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan verifikasi usulan program, kegiatan dan anggaran lingkup Bappeda;
 - f. penyusunan laporan pencapaian kinerja utama Bappeda; dan
 - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi:
- a. penghimpun dan pengelolaan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran Badan;
 - b. persiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Badan;
 - c. pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan;
 - d. pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - e. pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;

- 8 -

- f. pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Badan;
- g. pelaksanaan laporan prognosis;
- h. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan keuangan tahunan; dan
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja.

**Bagian Kedua
Bidang Ekonomi
Pasal 8**

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;
 - b. pengoordinasian penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPUPD, RPJMD dan RKPD) bidang ekonomi;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang ekonomi;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPUPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ekonomi;
 - e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang ekonomi;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten di bidang ekonomi;
 - g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang ekonomi;
 - h. monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah di bidang ekonomi;
 - i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang ekonomi;
 - j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah di bidang ekonomi;
 - k. pengkoordinasian dan fasilitasi kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan CSR;
 - l. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja bidang.

- 9 -

Paragraf 1
Sub Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan
dan Industri
Pasal 9

- (1) Sub Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Industri mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Industri mempunyai fungsi meliputi:
- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - b. rancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPUPD, RPJMD dan RKPD) urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - c. pengordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - d. pengordinasian pelaksanaan Misi-rengah (RPUPD, RPJMD dan RKPD) urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - e. pengordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - f. pengordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - g. pengordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - h. monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - i. pengordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - j. pengordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah pelaksana urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian; dan
 - k. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

- 10 -

Paragraf 2
Sub Bidang Pertanian dan Pangan
Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pertanian dan Pangan mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan pangan, kelautan dan perikanan dan pertanian serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Bidang Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi meliputi:
- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian dan kehutanan;
 - b. rancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian dan kehutanan;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian dan kehutanan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian dan kehutanan;
 - e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian dan kehutanan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian dan kehutanan;
 - g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian dan kehutanan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian dan kehutanan;
 - i. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian dan kehutanan;
 - j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah pelaksana urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian dan kehutanan; dan
 - k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

- 11 -

Paragraf 3
Sub Bidang Pengembangan Investasi,
Pariwisata dan Kebudayaan
Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi meliputi:
- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
 - b. rancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDA) urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPUPD, RPJMD dan RKPDA) urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
 - e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Persangkat Daerah urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
 - g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
 - i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
 - j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Persangkat Daerah pelaksana urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
 - k. pengoordinasian dan memfasilitasi kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan CSR; dan

- 12 -

- L. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

**Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM
Pasal 12**

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 - c. pengoordinasian perkembangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan Stafrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 - e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 - g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 - h. monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 - i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 - j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia; dan

- 13 -

- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja bidang.

Paragraf 1
Sub Bidang Pemerintahan
Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten

- 14 -

- urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - h. monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah pelaksana urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 - k. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Pembangunan SDM

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pembangunan SDM mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembangunan SDM mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;

- 15 -

- b. rancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;
- g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakuan bersama kerjasama antar daerah urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;
- h. monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;
- j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah pelaksana urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan; dan
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

**Paragraf 3
Sub Bidang Kependudukan
Pasal 15**

- (1) Sub Bidang Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, sosial,

- 16 -

pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai fungsi meliputi:
- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan administrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. rancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan administrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan administrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan Menteri Negara (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan administrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan administrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten urusan administrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan administrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah urusan administrasi kepedudukan

- 17 -

dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- i. pengordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan administrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pengordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah pelaksana urusan administrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- k. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

Bagian Keempat Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 16

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan tugas-jabatan pemerintah daerah, melaksanakan, mengordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. pengordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPUPD, RPJMD dan RKPD) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. pengordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. pengordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPUPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. pengordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. pengordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. pengordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- 18 -

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahian;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahian;
- j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahian;
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja bidang.

Paragraf 1
Sub Bidang Lingkungan Hidup dan SDA
Pasal 17

- (1) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan SDA mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan lingkungan hidup, kehutanan dan bidang keirigasian serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Lingkungan Hidup dan SDA mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup, kehutanan dan bidang keirigasian;
 - b. rancangan penyusutan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan lingkungan hidup, kehutanan dan bidang keirigasian;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, kehutanan dan bidang keirigasian;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan lingkungan hidup, kehutanan dan bidang keirigasian;
 - e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, kehutanan dan bidang keirigasian;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten urusan lingkungan hidup, kehutanan dan bidang keirigasian;
 - g. pengkoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan lingkungan hidup, kehutanan dan bidang keirigasian;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah urusan lingkungan hidup, kehutanan dan bidang keirigasian;

- 19 -

- i. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan lingkungan hidup, kehutanan dan bidang keirigasian;
- j. pengkoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah pelaksana urusan lingkungan hidup, kehutanan dan bidang keirigasian; dan
- k. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

Paragraf 2
Sub Bidang Transportasi
Pasal 18

- (1) Sub Bidang Transportasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Transportasi mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. rancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. pengkoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - i. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang;

- 20 -

- j. pengkoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah peleksana urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- k. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

Paragraf 3
Sub Bidang Perumahan, Permukiman,
Sanitasi dan Air Bersih
Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya, urusan pertanahan dan bidang pengelolaan sumber daya air serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas setengahnya dimaksud pada ayat(1), Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan segala perencanaan pembangunan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya, urusan pertanahan dan bidang pengelolaan sumber daya air;
 - b. perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya dan urusan pertanahan;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya dan urusan pertanahan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPUPD, RPJMD dan RKPD) urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya dan urusan pertanahan;
 - e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya dan urusan pertanahan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya dan urusan pertanahan;
 - g. pengkoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya dan urusan pertanahan;

- 21 -

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya dan urusan pertanahan;
- i. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya dan urusan pertanahan;
- j. pengkoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah pelaksana urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya dan urusan pertanahan; dan
- k. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

**Bagian Kelima
Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah
dan Program SDG's
Pasal 20**

- (1) Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. melakukan proses inventarisasi, identifikasi, analisa data dan informasi hasil pembangunan daerah;
 - c. merevaluasi pelaksanaan Program SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan aplikatif terhadap isu-isu aktual dan strategis;
 - b. penghimpunan, pengelolaan dan penyebarluasan hasil penelitian melalui pemanfaatan teknologi informasi atau media lainnya;
 - c. pengumpulan dan analisa data dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengkajian dan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - e. pengintegrasian dan harmonisasi program-program/kegiatan pembangunan daerah;

- 22 -

- f. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- g. penyusunan rencana pembangunan daerah jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- h. pengkoordinasian, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- i. penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- j. pengendalian pelaksanaan program pembangunan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- n. pelaksanaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- o. pelaksanaan Penyusunan LPPD Badan;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di daerah; dan
- q. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja bidang.

**Paragraf 1
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
Pasal 21**

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pengidentifikasian, penganalisaan, penelitian, dan penilaian hasil pembangunan sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan aplikatif terhadap isu-isu aktual dan strategis;
 - c. penghimpunan, pengelolaan dan penyebarluasan hasil penelitian melalui pemanfaatan teknologi informasi atau media lainnya;

- 23 -

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. penyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- f. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Data Pembangunan dan

Evaluasi Program SDG's

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Data Pembangunan dan Evaluasi Program SDG's mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi, evaluasi, menyusun kerangka perencanaan pembangunan daerah dan mengeletih data informasi hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan program SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data Pembangunan dan Evaluasi Program SDG's mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pengumpulan, penyusunan dan analisa data dan informasi pembangunan daerah sebagai bahan koordinasi perencanaan program pembangunan;
 - b. pengordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - c. pengordinasian, analisa dan sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahandan konektivitas daerah;
 - e. penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - f. pengintegrasian dan harmonisasi program-program/kegiatan pembangunan daerah;
 - g. pengkoordinasian terkait pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan;
 - h. pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
 - i. pengkajian, pengordinasian dan perumusan RTRW daerah;
 - j. penyusunan dan penyajian data informasi hasil pembangunan daerah sebagai bahan dokumentasi;
 - k. pengordinasian pendataan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - l. pengelolaan dan pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD);

- 34 -

- m. pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- n. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di daerah;
- o. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; dan
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

Paragraf 3
Sub Bidang Evaluasi Target Pembangunan Daerah
Pasal 23

- (1) Sub Bidang Evaluasi Target Pembangunan Daerah mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah dan mengumpulkan dan mendokumentasikan hasil pembangunan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur pada ayat (1), Sub Bidang Evaluasi Target Pembangunan Daerah mempunyai fungsi meliputi
 - a. pengolahan dan analisa data pembangunan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengembangan daerah;
 - b. pengolahan dan penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kerjatan pembangunan daerah secara periodik;
 - c. penyajian bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - d. penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kerjatan pembangunan daerah;
 - f. pengkoordinasian pendataan hasil evaluasi dan pelaporan kinerja pemerintah daerah;
 - g. pelaksanaan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKpj) Bupati;
 - h. pelaksanaan Penyusunan LPPD Badan; dan
 - i. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

BAB IV
UPT
Pasal 24

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan.

- 22 -

- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPT dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 25**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
TATA KERJA
Pasal 26**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan funginya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan

- 26 -

untuk memberikan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 27

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atau oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundangan undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atau oleh Kepala Badan mejaik Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundangan undangan.

BAB VIII ESELON JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT merupakan Jabatan Eselon IV a atau merupakan Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IV b atau merupakan Jabatan Pengawas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

- 27 -

Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI JEMBER,

ttd

Diundangkan di Jember
pada tanggal 8 Desember 2019

2019

FAIDA



BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2019 NOMOR 26

